

**PEMIKIRAN ABU AL-A'LA AL MAUDUDI DAN NURCHOLISH
MADJID TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA**

Skripsi

Di ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

SARI ASMIATIEN

NPM : 1621020583

Jurusan : Siyasah Syar'iyah



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2019 M

**KONSEP PEMIKIRAN ABU AL-A'LA AL MAUDUDI DAN NURCHOLISH
MADJID DALAM MEMAHAMI HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA**

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
mendapatkan gelar sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**

Oleh

SARI ASMIATIEN

NPM : 1621020583

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Pembimbing I : Dr, H. Khairuddin,. M.H.

Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2019 M

ABSTRAK

Relasi mengenai agama dan negara menjadi problematika yang banyak diminati oleh masyarakat muslim dan juga para pemikir politik Islam yang kerap menyuarakan pendapatnya akan hal ini. Relasi agama dan negara di Indonesia juga kerap menuai pro kontra dilihat dari sejarahnya saat pendiri negara Indonesia yang sebagian besarnya umat muslim memperdebatkan akan hal ini, terutama dalam arah kemana Indonesia akan dibawa saat masih baru merdeka. Sementara itu corak negara “Islam” dan “nasionalis” menjadi perdebatan panjang diantara pihaknya. Pendapat mengenai corak negara Islam wajib ditegakkan salah satunya disuarakan oleh Al Maududi, namun untuk melihat relevansinya di Indonesia maka perlu ditinjau dari pandangan tokoh Indonesia yakni Nurcholish Madjid yang berpendapat bahwa Indonesia lebih cocok dengan konsep nasionalisme-religius.

Dari pemikiran di atas maka rumusan masalah disini *pertama*, bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid dan Al Maududi dalam memahami hubungan agama dan negara?, *kedua*, apakah konsep negara menurut Al Maududi dan Nurcholish Madjid relevan jika diterapkan di Indonesia?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Al Maududi dan Nurcholish Madjid mengenai hubungan agama dan negara serta relevansinya di Indonesia sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah menambah bahan literatur pustaka khususnya dalam materi relasi agama dan negara.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang digunakan adalah data yang berasal dari sumber kepustakaan, dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yakni memaparkan data secara keseluruhan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer berasal dari buku yang ditulis langsung oleh Al Maududi dan Nurcholish Madjid sedangkan data sekunder dari buku, jurnal, artikel, koran dan majalah yang berkaitan dengan judul.

Penelitian ini menemukan potret pemikiran Al Maududi dan Nurcholish Madjid, kedua corak pemikiran mereka dalam hal relasi agama dan negara terlihat ada perbedaan yang diametris. Al Maududi menggambarkan relasi agama dan negara dapat diintegrasikan namun tetap mengakomodir demokrasi dimana kedaulatannya berada di tangan Tuhan (Theodemokrasi), sedangkan dalam pemikiran Nurcholish Madjid berpendapat bahwa Islam adalah agama yang mesti dijalankan sebagai Identitas Indonesia bukan diterapkan dalam bentuk negara secara simbolis, melainkan Islam dimasukkan senetral mungkin dalam penerapan hukum Indonesia dimana sumber materiil hukum Islam dimungkinkan dapat dipositivisasikan sebagai hukum nasional. Inilah titik temu ideologi pancasila dikatakan sebagai jalan tengah oleh Nurcholish Madjid dalam melihat Indonesia bukan sebagai negara sekuler atau theokrasi. Sementara relevansi agama dan negara menurut Al Maududi dan Nurcholish Madjid keduanya memiliki keterkaitan di Indonesia, dimana hukum Indonesia tidak bisa lepas dari hukum Islam. Namun, untuk penegakkan negara Islam perlu dipertimbangkan kembali karena Indonesia merupakan negara multikultural sehingga jika Islam dijadikan agama negara akan memecah belah persatuan Indonesia.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : **"Pemikiran Abu Al-A'la Al Maududi dan Nurcholish Madjid Tentang Hubungan Agama dan Negara"**

Nama : **Sari Asmiation**

NPM : **1621020583**

Jurusan : **Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP.1962102199930311002

Drs. Henry Iwansyah, M.A.

NIP.195812071987031003

Ketua Jurusan Siyasah

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“KONSEP PEMIKIRAN ABU AL-A’LA
AL MAUDUDI DAN NURCHOLISH MADJID DALAM
MEMAHAMI HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA”**

disusun oleh Nama: SARI ASMIATIEN NPM:1621020583,
Program Studi : Siyashah Syar’ iyyah (Hukum Tata Negara)

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. A Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.A. (.....)

Penguji Utama : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

**Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. H. Khairuddin., M.H.
NIP. 1962102199930311002.

MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥٩﴾

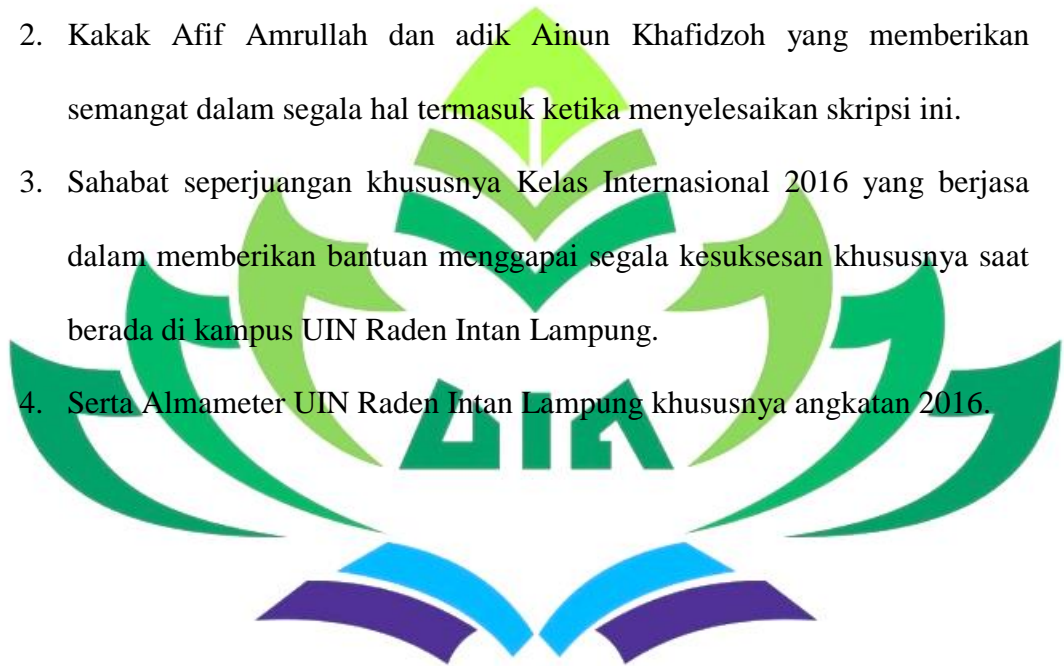
Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. An-Nisa: 59)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

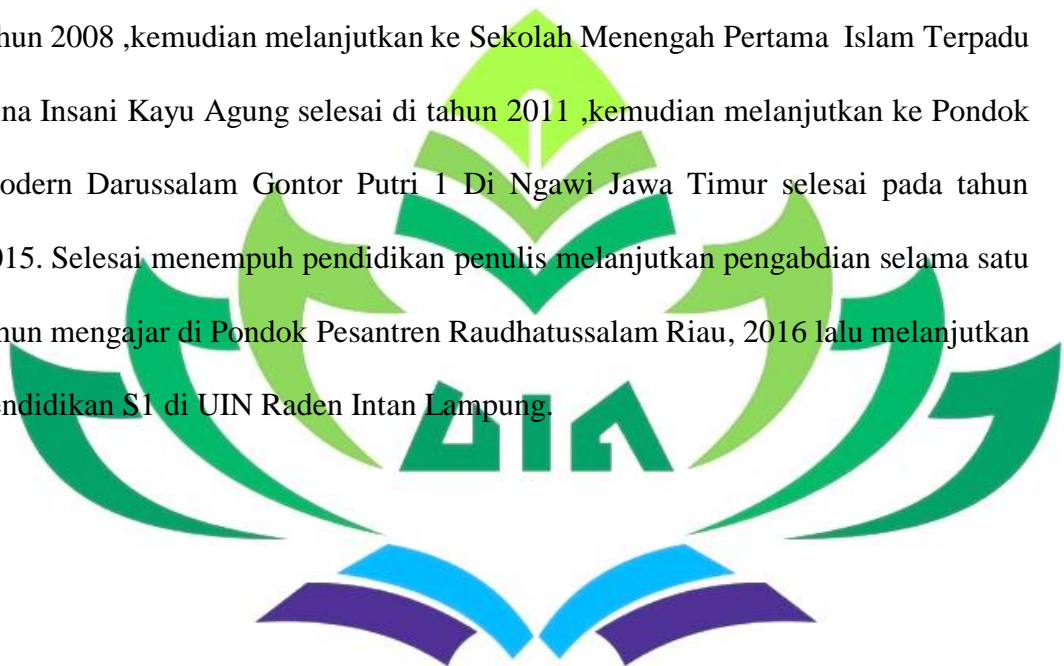
1. Kedua orang tuaku bapak Wagiran Prawoto dan ibu Ni'amah yang telah memberikan kasih sayang dan mendidik dari aku kecil hingga sekarang selalu memberikan semangat dalam segala keadaan.
2. Kakak Afif Amrullah dan adik Ainun Khafidzoh yang memberikan semangat dalam segala hal termasuk ketika menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat seperjuangan khususnya Kelas Internasional 2016 yang berjasa dalam memberikan bantuan menggapai segala kesuksesan khususnya saat berada di kampus UIN Raden Intan Lampung.
4. Serta Almameter UIN Raden Intan Lampung khususnya angkatan 2016.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sari Asmiation dilahirkan di rotan mulya tanggal 14 Juli 1996, anak ke-dua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Wagiran Prawoto dan ibu Ni'amah.

Pendidikan sekolah dasar penulis tempuh di SDN 1 Rotan Mulya pada tahun 2008 ,kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bina Insani Kayu Agung selesai di tahun 2011 ,kemudian melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 Di Ngawi Jawa Timur selesai pada tahun 2015. Selesai menempuh pendidikan penulis melanjutkan pengabdian selama satu tahun mengajar di Pondok Pesantren Raudhatussalam Riau, 2016 lalu melanjutkan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan karunia Nya berupa pengetahuan, petunjuk, kesehatan sehingga skripsi dengan judul KONSEP PEMIKIRAN ABU AL-A'LA AL MAUDUDI DAN NURCHOLISH MADJID DALAM MEMAHAMI HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan dengan tujuan memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) jurusan hukum tata negara, Fakultas Syari'ah untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan sebesar-besarnya kepada semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. secara rinci ucapan terima kasih penulis ungkapkan kepada:

1. Dr. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sekaligus pembimbing I dan Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta saran hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Siyasah yang memberikan fasilitas untuk segala kepentingan mahasiswa.

3. Bapak dan ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan memberikan kenyamanan dalam proses pengerjaan skripsi di Fakultas Syari;ah.
4. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas penuh berupa pengelolaan perpustakaan dalam hal memberikan informasi, referensi, dan buku yang bermanfaat khususnya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk teman-temanku seperjuangan angkatan 2016, Ratih Purwaningsih, Putri Tania, M.Sofyan Yusuf, Ramada Hendrian, Julia Hernida, Okky Krisna Budi yang telah memberikan saran berharga sehingga penulis bisa mendapatkan informasi sampai skripsi ini bisa diselesaikan.

Semoga amal ibadah Bapak, Ibu dan Teman-teman sekalian bisa mendapat balasan dari Allah Swt. Penulis berharap skripsi ini nantinya bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2019
Penulis,

Sari Asmiatien
NPM: 1621020583

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus Penelitian.....	4
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Signifikasi Penelitian.....	9
G. Tujuan penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	10
BAB II ISLAM DAN NEGARA	
A. Konsep Agama Dan Negara Menurut Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer	15
1. Konservatif	17
2. Moderat	22
3. Sekuler.....	24
B. Biografi Al Maududi Dan Karyanya.....	35
1. Biografi Al Maududi Dan Karyanya.....	35
2. Corak Pemikiran Al Maududi Mengenai Hubungan Agama dan Negara.....	42
BAB III BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID	
A. Biografi Nurcholish Madjid dan Karyanya.....	52
1. Biografi Nurcholish Madjid	52
2. Karya Nurcholish Madjid dan Corak Pemikirannya.....	57
B. Corak Pemikiran Nurcholish Madjid Mengenai Hubungan Agama dan Negara	58

BAB IV ANALISIS

- A. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Al Maududi dan Nurcholish
Madjid Tentang Konsep Hubungan Agama dan Negara 68
- B. Relevansi Pemikiran Al Maududi dan Nurcholish Madjid Mengenai
Kehidupan Bernegara Di Indonesia kesimpulan..... 72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 78
- B. Rekomendasi..... 80

DAFTAR PUSTAKA **LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“PEMIKIRAN ABU AL-A’LA AL MAUDUDI DAN NURCHOLISH MADJID TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA”**, sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut mengenai skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi antara lain:

1. Abu A’la Al Maududi adalah pemikir besar Islam kontemporer dari benua india. Dilahirkan pada tanggal 25 september 1903 di Aurangabad, India tengah. Meninggal pada tanggal 23 september 1979 di New York.¹
2. Nurcholish Madjid merupakan tokoh pembaharuan pemikiran Islam, Yang juga merupakan tokoh pemikir politik Islam. Lahir di jombang, 17 maret 1939 dan meninggal di Jakarta, 29 agustus 2005²
3. Hubungan adalah kaitan, bersangkut paut, langsung. Jadi, hubungan adalah semua hal yang harus saling dikaitkan baik secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dengan urutan yang teratur.³
4. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan serta tata kaidah yang

¹ Munawir Sjadali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 157.

² Nur Khalid Ridwan, et al, *Pluralisme Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), h.37-38.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: kantor balai pustaka, 1989), h. 364.

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Agama yang dimaksud oleh penulis adalah agama Islam, karena tokoh yang diangkat oleh penulis adalah tokoh yang beragama Islam.⁴

5. Negara menurut Djoekosoetono diartikan sebagai sebuah organisasi manusia atau sekumpulan manusia, organisasi tersebut muncul serta berada dalam sebuah sitem pemerintahan yang sama.⁵ Adapun yang dimaksud negara dalam skripsi ini adalah negara Republik Indonesia. sebuah negara dengan bentuk pemerintahan republik.

Berdasarkan pengertian berbagai istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah studi analisis tentang pemikiran Al Maududi dan Nurcholish Madjid yang berkenaan dengan keterkaitannya antara agama dan negara serta relevansinya di Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan penulis tertarik dan memilih judul tersebut yaitu:

1. Alasan Objektif

- a. Masalah hubungan agama dan negara adalah masalah yang selalu aktual diperbincangkan, dan dikaji bahkan diperdebatkan.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 17.

⁵ Ahmad sucardja, *Hukum Tata Negara & hukum administrasi Negara dalam perspektif fiqh siyasah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1983, h. 496.

- b. Permasalahan hubungan agama dan negara di Indonesia dalam pemikiran politik Islam masih diperdebatkan dan menimbulkan implikasi yang mengarah pada perpecahan umat.
- c. Nurcholish Madjid dan Al Maududi adalah tokoh pemikir politik Islam yang juga memberikan pemikiran mengenai hubungan agama dan negara, dimana saat ini negara Islam tengah diperjuangkan sebagian kelompok.
- d. Al Maududi merupakan tokoh dari Pakistan dimana pemikirannya banyak dipengaruhi oleh geografi, suku, dan bentuk pemerintahan Pakistan namun ada beberapa hal yang relevan dengan Indonesia, begitu pula dengan Nurcholish Madjid yang merupakan tokoh pemikir politik Islam yang menyuarakan pendapat kontroversional mengenai hubungan agama dan negara.

2. Alasan subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iyah.
- b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan cukup banyak dan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
- c. Belum ada yang memilih judul skripsi ini di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iyah

C. Latar belakang masalah

Pembahasan mengenai persoalan hubungan agama dan negara menjadi topik paling diminati oleh masyarakat Indonesia, yang mayoritasnya beragama Islam. Indonesia merupakan mayoritas bangsa muslim terbesar di dunia sekitar 87,55 persen (tahun 2000: 206.000.000) beragama Islam sekalipun Islam tidak disebut sebagai konstitusi sebagai agama negara.⁶

Faktor mayoritas agama Islam yang besar tersebut berkaitan dengan fenomena hadirnya sekelompok golongan yang menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia, yang akhirnya mampu menarik para pemikir politik Islam untuk menyuarakan pendapatnya akan persoalan ini.

Faktor mendasar yang menguatkan pendirian negara Islam adalah mayoritas agama di Indonesia yaitu Islam, sehingga keterlibatan unsur agama Islam terlihat sangat jelas dalam berbagai macam aspek kehidupan. Tidak mengherankan jika hubungan antara agama dan negara ini menuai pro kontra karena dilihat dari perjuangan kemerdekaan negara yang tidak dilakukan oleh sekelompok Islam saja dan juga Indonesia merupakan negara majemuk dengan berbagai macam suku, ras, budaya serta agama.

Syariat Islam yang dinilai mampu menyelesaikan berbagai masalah kerap diyakini oleh pemeluknya bahwa keterlibatan penerapan syariat Islam dalam suatu negara akan menjadi jawaban dari beberapa masalah aktual yang menyangkut negara saat ini, termasuk di Indonesia.

⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h.1.

Secara global di dunia Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan: *pertama*, berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang mencakup pengaturan bagi semua aspek manusia termasuk ketatanegaraan. *Kedua*, berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, Islam tidak ada kaitannya dengan ketatanegaraan karena Nabi Muhammad SAW bukanlah sebagai kepala negara melainkan hanya utusan Allah SWT. *Ketiga*, berpendapat bahwa aliran ini menolak Islam adalah agama yang lengkap, namun juga menolak bahwa Islam tidak ada hubungannya sama sekali dengan ketatanegaraan, aliran ini mengatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.⁷

Munculnya konsep negara Islam yang dikaitkan dengan khilafah ini memberikan pilihan secara tidak langsung antara konsep negara dengan sistem khilafah atau nasionalis. Kelompok Islamisme/fundamentalis sendiri muncul dan berpendapat bahwa muslim wajib mendirikan negara Islam.⁸ Kemunculan dua kubu tersebut maka peluang perpecahan akan sangat memungkinkan untuk terjadi bagi para pejuang negara dengan sistem khilafah dan nasionalis.

Perbedaan pendapat di Indonesia tentang agama dan negara menjadi permasalahan yang serius. Seorang tokoh yang aktif dalam organisasi Islam yaitu HMI, Nurcholish Madjid juga ikut menyuarakan pendapat dengan gagasan-gagasan kritisnya. Ia adalah tokoh pembaharuan pemikiran Islam yang

⁷ Munawir Sjadali, *Islam dan Tata Negara*, h. 1.

⁸ Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah: Kritik Reasi-Kuasa Khalil' Abd Al-Karim di Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016), h.1.

revolusioner dan kemudian membuahkanya karya dan pemikiran yang kerap menuai pro dan kontra.

Munculnya gagasan Islam sebagai dasar politik menurut pemikiran Nurcholish Madjid disebabkan kecenderungan pemikiran apologetis. Apologi ini tumbuh melalui dua jalur, yang pertama melalui jalur *pertama* apologi karena ideologi barat, seperti demokrasi, komunisme dan sosialisme. *Kedua*, karena legalisme yaitu apresiasi serba legalistik terhadap Islam.⁹ Dalam hal ini legalistik Islam dipandang sebagai struktur dan kumpulan hukum yang berakar dari fiqh hasil pemikiran sarjana Islam pada abad ke 2 dan 3 hijriah dan tidak mustahil fiqh kehilangan relevansinya dengan kehidupan manusia yang semakin modern. Dengan demikian, baginya Islam bukanlah ideologi, sebab jika Islam dipandang sebagai ideologi sama dengan merendahkan agama menjadi setara dengan berbagai ideologi lain yang ada di dunia.

Nurcholish Madjid menentang jika antara agama dan negara tidak ada kaitannya sama sekali, karena nilai dalam Islam sendiri menjadi landasan hidup yang mencakup segala aspek di lingkungan masyarakat dan juga kehidupan negara, namun menolak jika Indonesiadijadikan sebagai negara Islam karena Indonesiabukanlah negara agama. Gagasan paling populer yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid berkaitan dengan hal ini adalah sekulerisasi yaitu menduniawikan hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak mengukhrawikannya.

⁹ Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), h. 67.

Seperti yang kita ketahui bahwa umat Islam menjadikan Al Quran dan sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, namun bagaimana makna dan implementasi kitab suci tersebut dalam kehidupan sehari-hari merupakan produk interpretasi manusia dan tindakan manusia dalam konteks sejarah yang spesifik, dalam kata lain timbul dari opini manusia sendiri.

Bukan hanya sosok Nurcholish Madjid saja, seorang tokoh yang berasal dari benua india juga mengungkapkan pemikirannya. Berbeda dengan Nurcholish Madjid, Al Maududi memandang bahwa dalam pembentukan sebuah negara seharusnya dikembalikan kepada sistem pada masa khulafaur rasyidin. Tak hanya sebatas itu, Maududi juga menentang pemahaman barat dalam pendirian sebuah negara. Untuk *kedaulatan rakyat* yang selama ini diakui di beberapa Negara termasuk Indonesia juga ditentang oleh Al Maududi, menurutnya kedaulatan tertinggi merupakan kedaulatan pada Allah SWT. Jawaban mengenai pertanyaan mengapa muslim menginginkan negara Islam juga telah dijelaskan oleh Al Maududi dengan sangat jelas yakni perbedaan antara paham barat dalam konsep Islam, dan juga negara Islam dinilai lebih ideal dibandingkan negara dengan konsep barat.¹⁰

Tampaklah perbedaan yang teramat besar mengenai konsep kenegaraan yang dibawakan oleh Nurcholish Madjid dan Al Maududi yang keduanya sama-sama tokoh beragama Islam. Berbicara mengenai pemikiran Al Maududi besar kaitannya dengan sejarah Pakistan dalam mempertahankan bentuk negaranya,

¹⁰ Sayyid Abul A'la Al Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publications, 1960), h.2.

sehingga jika sekelompok Islam Indonesia menggunakan konsep negara harus dikembalikan kepada mas Khulafaur Rasyidin maka perlu dikritisi kembali menggunakan pemikiran tokoh Indonesia yang seimbang pemikirannya dengan Al Maududi yakni Nurcholish Madjid.

Berdasarkan latar belakang masalah bahwa konsep negara dan agama oleh para tokoh Islam terbagi dalam berbagai macam perbedaan pendapat maka dalam hal ini penulis akan mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid dan Al Maududi tentang hubungan agama dan negara serta relevansinya di Indonesia.

D. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penelitian difokuskan terlebih dahulu sehingga tidak akan terjadi perluasan pembahasan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Disini penulis memfokuskan pada permasalahan hubungan agama dan negara dilihat dalam konsep Al Maududi dan Nurcholish Madjid. Untuk meneliti permasalahannya peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode yang cocok karena penelitian ini memerlukan data-data yang bukan terdiri dari angka-angka melainkan literatur kepustakaan yang mendukung sebagai data yang sah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar diperoleh pembahasan yang konsisten mengenai objek material yang dikaji. Maka masalah yang menjadi perhatian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid dan Al Maududi dalam memahami hubungan agama dan negara?
2. Apakah konsep negara menurut Al Maududi dan Nurcholish Madjid relevan jika diterapkan di Indonesia?

F. Signifikasi Penelitian

Signifikasi atau manfaat penelitian adalah sesuatu yang diharapkan bisa tercapai oleh penulis dalam suatu penelitian. Dalam hal ini manfaat atau kegunaan penelitian dibedakan menjadi dua yakni teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami hubungan antara agama dan negara, memberikan wawasan kepada penulis dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan khususnya dalam Ilmu Syari'ah dan hukum.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain khususnya dalam memberikan pengetahuan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia serta untuk memenuhi salah satu syarat akademisi dalam rangka menyelesaikan studi dan mencapai gelar S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian atau riset pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, ¹¹demikian pula halnya dengan penelitian yang akan diungkapkan dalam skripsi ini mempunyai tujuan tertentu. Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang yang membangun pemikiran Nurcholish Madjid.dan Al Maududi.
- b. Untuk mengetahui pemikiran Nurcholish Madjid dan Al Maududi mengenai hubungan agama dan negara dalam pemikiran politik Islam di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian diperlukan metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga dapat diuji kebenarannya, dan untuk mempermudah mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas, sehingga penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Metode dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat esensial, sebab dengan adanya metode akan dapat memperlancar penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian'
 - a. Jenis penelitian

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), h.290.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian kepustakaan adalah "suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literature dan mempelajarinya."¹² Adapun bentuk penyajian datanya dilakukan secara deskriptif-kualitatif, deskriptif yaitu memaparkan data secara keseluruhan, kualitatif yaitu bentuk pemaparan data menggunakan kata-kata bukan menggunakan angka.¹³

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian komparatif yaitu yang bersifat membandingkan. Penelitian ini memabandingkan dua atau lebih fakta-fakta dan objek-objek yang diteliti.

2. Sumber data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (pokok) dan data sekunder (tambahan).

a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung dapat diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan yang khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang ditulis Nurcholish Madjid: *Islam kemodernan dan keIndonesiaan*. dan *the Islamic law and constitution* karangan Al Maududi.

¹² Muhammad Munawar Ahmdi, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih. 1975), h.2

¹³ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.3

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dari berbagai sumber yang ditulis tokoh lainnya yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. yakni dari buku-buku, majalah dan Koran. Di antaranya buku: *Islam Dan Tata Negara, Sistem Politik Islam Dan Historisitas Syariah*.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang mendukung data primer dan sekunder. Sumber dari data ini berasal dari kamus, gambar, katalog, ensiklopedia, daftar pustaka buku, majalah, catatan harian dan Koran.

3. Pengumpulan data

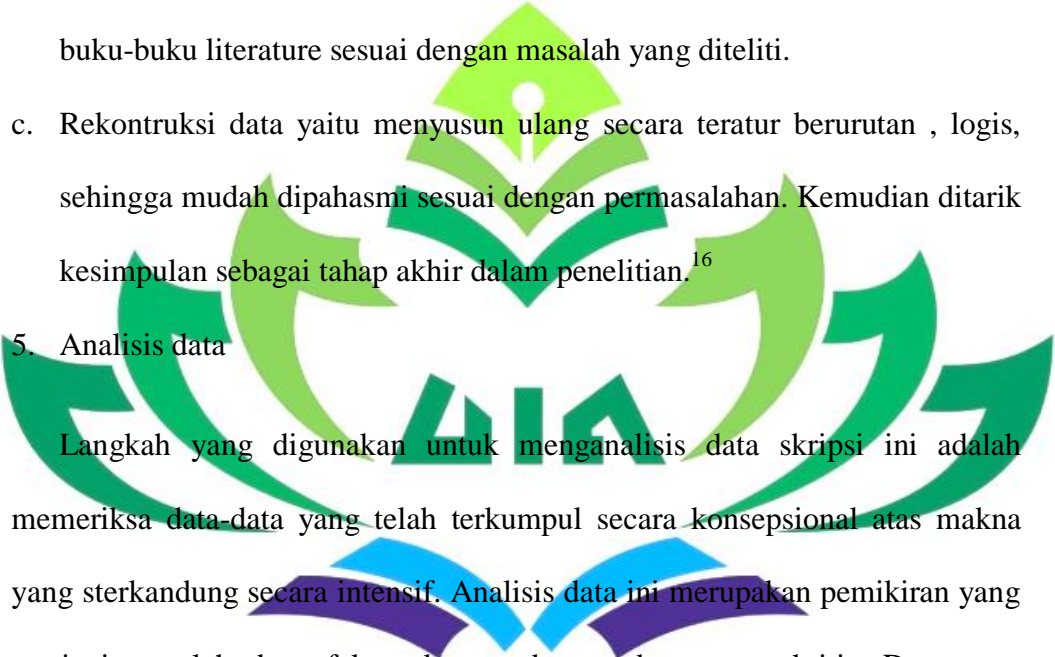
Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁴ Pengumpulan data dalam skripsi ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu : mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, manuskrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan lain-lainnya.¹⁵

4. Pengolahan data

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan.

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.211.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi II*. (Jakarta: Renika Cipta, 1993), h.107.

- 
- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis, dan memeriksa ulang kesesuaian permasalahan yang akan diteliti setelah data itu terkumpul.
 - b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al Qur'an dan hadist, atau buku-buku literature sesuai dengan masalah yang diteliti.
 - c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan , logis, sehingga mudah dipahamsi sesuai dengan permasalahan. Kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam penelitian.¹⁶

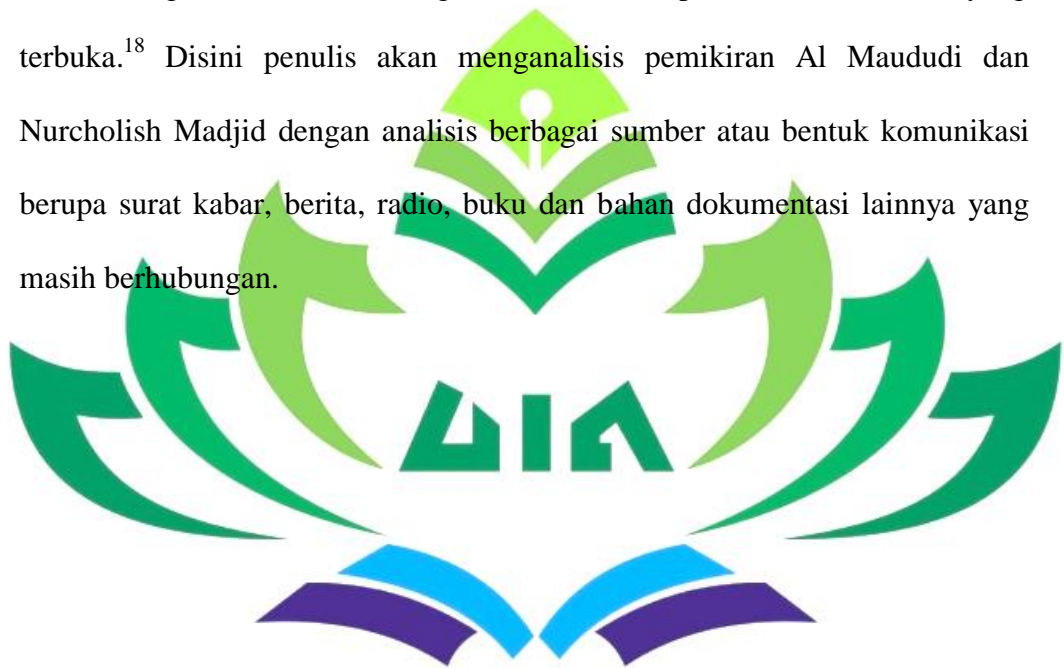
5. Analisis data

Langkah yang digunakan untuk menganalisis data skripsi ini adalah memeriksa data-data yang telah terkumpul secara konsepsional atas makna yang terkandung secara intensif. Analisis data ini merupakan pemikiran yang merinci masalah data, fakta, dan sumber-sumber secara kritis. Data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu cara berfikir dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkrit dan kemudian dari fakta dan peristiwa konkrit tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

¹⁶ Aminaklin & Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) , h.107.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Cetakannya ke III*, (Bandung: Bina Aksara, 1990) , h.211.

Untuk menyajikan data dalam bentuk uraian skripsi, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam mengenai isi suatu informasi tertulis atau yang dicetak di media massa. Menurut Budd content analysis adalah suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis isi pesan dan untuk mengolah pesan atau alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi dari perilaku komunikasi yang terbuka.¹⁸ Disini penulis akan menganalisis pemikiran Al Maududi dan Nurcholish Madjid dengan analisis berbagai sumber atau bentuk komunikasi berupa surat kabar, berita, radio, buku dan bahan dokumentasi lainnya yang masih berhubungan.



¹⁸ Rahmat Kriyantono, *Tekhnik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h.232.

BAB II

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM

A. Konsep Agama dan Negara Menurut Pendapat Tokoh Klasik dan Kontemporer

Seiring berjalannya waktu Islam yang ada di Indonesia memiliki beberapa aliran sehingga di setiap aliran tersebut terdapatlah pengikut-pengikut fanatik dan menganggap Islam yang dipilihnya merupakan Islam paling benar di antara lainnya. Pengaruh beberapa aliran tersebut secara tidak langsung menentukan bagaimana seseorang memandang hubungan Islam dan negara di Indonesia. Para tokoh pemikir politik Islam di Indonesia tidak ketinggalan untuk mengemukakan pendapatnya akan hal ini.

Indonesia merupakan negara yang unik dengan keberagaman golongan muhammadiyah, NU, Sunni, syiah dan lainnya dimana keberagaman ini terus mendapatkan tantangan berupa tuduhan, moderat, sekuler dan konservatif.¹⁹ Bisa dikatakan bahwa perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dan negara ini menjadi faktor pertama yang memicu konflik intelektual di kehidupan umat Islam.²⁰

Hubungan antara agama dan negara kerap disesatkan ke arah sekuler, moderat dan konservatif hingga para tokoh pemikir besar sekalipun berbeda pendapat mengenai hal ini. Dalam teori klasik Islam yang menjelaskan

¹⁹ Masnun Tahir, *Menjadi Muslim di Negara Multicultural: Dinamika, Tantangan dan Strategi dalam Perspektif Fikih Multicultural*, (Al-'Adalah, Vol 14, No.2 tahun 2017), h.263. (On-Line). Tersedia di scholar.google.co.id/citations (diakses pada tanggal 10 September 2019, Pukul 21.00), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

²⁰ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. Ke-1, 1999), h.1.

mengenai tujuan dibentuknya sebuah negara bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan *lahiriyah* saja namun juga untuk memenuhi kebutuhan *ruhaniyah*. Demi kepentingan ini maka agama harus dijadikan landasan untuk bernegara. Berdasarkan hal tersebut menurut Delliar Noer Islam paling tidak muncul dalam dua aspek yakni agama dan masyarakat politik, namun untuk menartikulasikannya dalam kehidupan telah menjadi problematika tersendiri dari sinilah muncul doktrin yang berbunyi *al Islam huwa al-din wa al-daulah* (Islam adalah agama dan negara)²¹ dengan kata lain tidak ada pemisahan antara kedua hal ini dan dipegang teguh oleh para kelompok konservatif.²²

Kelompok lain yang menolak pemahamann di atas yakni pemegang teguh kepercayaan bahwa antara agama dan negara merupakan urusan berbeda dan tidak saling berkaitan sehingga kewajiban untuk membangun negara Islam tidak diperlukan disini adalah kelompok sekuler.

Namun diantara dua kelompok di atas terdapat kelompok yang tidak tergolong dalam kategori konservatif dan sekuler adalah kelompok moderat. Golongan ini memandang bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmah, sehingga jalur pertikaian yang kerap ditunjukkan kelompok konservatif dianggap bukanlah suatu bentuk yang menunjukkan agama rahmah tersebut. Sedangkan pemisahan agama dengan negara yang dianut oleh ideologi barat juga bukanlah sesuatu yang benar karena dengan pemisahan tersebut maka

²¹ Ahmad Suaedy, *Pergulatan Pesantren Demokrasi*, (Yogyakarta: LKiS), h.88.

²² M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*,h.3.

nilai agama tidak masuk ke dalam kehidupan sosial politik masyarakat yang didalamnya juga terdapat tata kehidupan bernegara.

Hubungan agama dan negara merupakan persoalan yang kerap menuai perbincangan dan perdebatan para tokoh mulai di era klasik hingga kontemporer.²³ Perdebatan dan diskusi mengenai hubungan agama dan negara ini selalu diperbincangkan karena peletakannya yang selalu dihadapkan satu sama lain, sebagai contoh antara dunia dan akhirat. Dengan letaknya yang selalu berhadapan inilah timbul perdebatan dimana hubungan paling tepat antara keduanya termasuk didalamnya hubungan agama dan negara di Indonesia.

1. Konservatif

Konservatif dalam Cambridge dictionary adalah *against change* atau menolak perubahan, *not usually liking or trusting change, especially sudden change* (tidak suka dengan perubahan terlebih yang tiba-tiba). Awal mula Indonesia merdeka hingga orde baru, hubungan antar agama penduduk Indonesia bisa dikatakan adem ayem tidak ada pergesekan sama sekali. Keadaan berbalik ketika tumbangnya orde baru dan disinilah mulai tercorengnya Islam dengan isu pendirian negara Islam dimulai dari kasus bom bali 1 dan 2, menguatnya penggunaan perda syariah dan isu lainnya yang mengarah pada Islam konservatif. Tokoh Islam konservatif yaitu

²³ Dede Rosyada, et al., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet Ke-1, 2000), h.58.

a. Hasan Al Bana

Imam Syahid Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman al Bana lahir pada tahun 1906, di dekat kawasan Iskandariyah. Ia merupakan salah satu tokoh pendiri Ikhwanul Muslimin yaitu gerakan politik yang menuntut untuk memberikan perbaikan dari dalam terhadap pemerintah, meluruskan hubungan antara umat Islam dan bangsa lain di luar negeri dan juga mendidik bangsa agar memiliki kemuliaan dan identitasnya.²⁴ Ia mendirikan Ikhwanul Muslimin bersama dengan beberapa pengikutnya. Ayahnya merupakan murid dari Muhammad Abduh sehingga bisa dikatakan bahwa ayahnya tidak pernah mendapat pendidikan agama murni melainkan gagasan pembaharuan.

Pendapat Hasan Al Bana mengenai Islam adalah agama yang tidak memisahkan antara Islam dengan negara, bahkan ideologi-ideologi dalam Islam mengarahkan umatnya untuk komitmen memberi jaminan dan keamanan. Mengenai perlakuan baik terhadap bangsa barat ini tercantum dalam ayat at taubah ayat :7²⁵

²⁴ Zaprul Khan, *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam* (walisongo, Vol.22 No.1 tahun 2014) h.162 (On-Line). Tersedia di [journal.walisongo.ac.id>article>view](http://journal.walisongo.ac.id/article/view) (diakses pada tanggal 21 September 2019 pukul 23.10), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

²⁵ Hasan Al-Bana, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Daarud-Dakwah, Iskandaria: 2018), h.91.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا
 الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ
 فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٥٦﴾

bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat MasjidilharamMaka selama mereka Berlaku Lurus kepadamu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa..

Mengenai sistem pemerintahan paling ideal menurut Hasan Al-Bana merupakan pemerintahan atas apa yang digariskan oleh Allah SWT untuk umatnya dengan menghindari kekacauan dan dipilihnya pemimpin untuk menghindari hal tersebut.

Sebagai tiang penyangga dalam pemerintahan Islam berdasarkan tiga tiang yaitu : rasa tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat, dan sikap menghargai aspirasi rakyat.²⁶ Seorang muslim tidak akan bisa menyempurnakan agama Islamnya ketika ia belum menjadi politikus menurut Hasan Al Bana, sebab dengan menjadi politikus maka pandangan mengenai problematika-problematika umatnya, memperhatikan apa saja urusannya dan membantu mencari jalan keluar dalam setiap masalah.

²⁶ Ibid, h.275-276.

Mengenai sikap memisahkan antara agama Islam dengan negara merupakan sikap yang salah, jika masih menentang akan hal ini maka makna Islam harus dipahami kembali oleh penganutnya.²⁷

b. Sayyid Quthb

Tahun 1966 Sayyid Quthb meninggal karena di eksekusi mati dengan cara digantung. Latar belakang pendidikannya di mesir antara tahun 1930-1940 di bidang literatur. Ia merupakan tokoh di bidang sastra yang sudah terkemuka namanya dan sudah berkali-kali mengkritik keras modernisasi, hedonisme sehingga bisa dikatakan ia produktif dalam menuliskan banyak tulisan yang mengkristalisasikan fundamentalisme.²⁸

Ia merupakan penerus Hasan Al Bana termasuk yang meneruskan doktrin yang dianut oleh Ikhwanul Muslimin sepeninggalan Hasan Al Bana yakni mengenai jahiliyah modern. Cangkupan yang terdapat dalam jahiliyah modern adalah masyarakat politik yang memberikan keabsahan semacam kedaulatan rakyat dibandingkan dengan kedaulatan Tuhan yang bernilai mutlak.

²⁷ Muhammad Abdul Kadir Alfaris, *Fiqh Politik Hasan Al Banna*, (Solo: Media Insane, 2003), h.28.

²⁸ Emmanuel Sivan, *Radical Islam: Medieval Theology And Modern Politics*, (London: New Heaven, 1985), h. 21.

Manusia tidak akan mampu mengubah ketentuan Allah SWT dalam mengatur dan mengendalikan alam semesta, untuk itulah manusia harus kembali ke dalam Islam dalam menjalani kehidupan mereka. Kejahiliyahan menurut Sayyid Qutb adalah yang menganut bahwa kedaulatan ada di tangan manusia, disini ia berpendapat bahwa kedatangan Islam adalah untuk mengembalikan manusia, berikut juga alam semesta, kepada kedaulatan Allah SWT.²⁹

c. Muhammad Rasyid Ridho

Lahir pada tahun 1865, di kota Beirut, Libanon yang sebelum perang dunia ke I masuk ke dalam wilayah Siria. Ia berpendapat bahwa mendirikan khilafah adalah keharusan agama hal ini sesuai dengan QS An nisa :59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnah)

Dalam konsep hukum Islam yaitu syariah membutuhkan kekuasaan dalam hal penegakan hukumnya, mustahil jika

²⁹ Sayyid Qutb, *Ma'alim fi Ath-Thariq*, (Darul Uswah: Yogyakarta, 2009), h. 92-93.

penerapan syariah bisa dilakukan tanpa mendirikan negara Islam. Untuk itulah penting menegakkan syariat Islam untuk membedakan mana negara Islam dan non Islam.³⁰

2. Moderat

Menurut Muhammad Ali makna dari moderat adalah segala jalan yang ditempuh tanpa jalan kekerasan baik dalam visinya maupun dalam realisasinya.³¹ Islam jalan tengah atau *wasatiyah* yang dianggap paling aman versi Indonesia saat ini adalah Islam moderat dengan konsep ahlu sunnah wal jamaah yaitu al adalah (keadilan), al tawazun (keseimbangan), dan al tasamuh (toleransi). Lebih detail lagi Islam moderat dikategorikan dalam beberapa hal yaitu berperilaku normal (*tassawuf*) dalam mengerjakan perintah agama, toleransi terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, memprioritaskan dialog, mengakomodir konsep-konsep modern yang memiliki kandungan maslahat, berfikir rasional terhadap wahyu, menafsirkan teks secara kontekstual tidak tekstual, dan menggunakan ijtihad dalam permasalahan yang tidak termaktub dalam al qur'an atau sunnah. Dengan begitu Islam moderat merupakan Islam yang memberikan *rahmah* dengan sikap toleran terhadap agama-agama yang berbeda dengannya.

³⁰ Asghar Ali Engineer, *Revolusi Negara Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000), h. 168.

³¹ Muhammad Ali, *Moderate Islam Movement in Contemporary Indonesia*, (Jakarta:Center For Strategic and International Studies, 2007), h.198.

Dalam konsep ini perjuangan kaum Islamis dalam memperjuangkan negara Islam dengan jalur kekerasan tidak menjadikan *rahmah*, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai moderat. Mengenai pemaknaan moderat sendiri, sulit didefinisikan, bahkan beberapa kelompok memperebutkan tentang pemaknaan ini mulai dari tokoh agama hingga ilmuwan sehingga pemaknaannya tergantung oleh siapa dan konteks mana ia dipahami. Salah satu pemaknaan yang paling pas adalah Najib Burhani yakni moderat ialah orang atau organisasi yang berada di tengah-tengah antara liberalisme dan Islamisme.³²

Pada kesempatan di acara MTQN ke-26 Presiden Indonesia yakni Joko Widodo periode 2014-2019 memberikan pidato yang menyatakan bahwa di Indonesia keberadaan karakter moderat di Indonesia makin dipertegas. Saatnya bagi Indonesia untuk menjadi sumber pemikiran sekaligus sumber pembelajaran Islam bagi dunia. Hal ini dilihat karena negara lain masih mencari formula dari negara Islam itu sendiri.³³

Tokoh Islam moderat di antaranya adalah Ibnu Taimiyyah. Nama lengkapnya yaitu Taqi Al-din Ahmad Ibnu Taimiyah, yang sempat menuntut dengan keras dibuka kembali pintu *ijtihad*. Pendapat mengenai negara dan agama Saling berkaitan menjadi satu,

³² Ahmad Najib Burhani, *Pluralism, Liberalism and Islamism: Religion Outlook Of The Muhammadiyah Islamic Movement in Indonesia*, (Inggris: University Of Manchester, 2007), h.17.

³³ Toto Suharto, *Indonesianisasi Islam*, (At Tahrir. Vol 17 No.01, 2017), h.162 (On-Line). Tersedia di <https://www.researchgate.net/publication> (diakses pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 00:24), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

negara tidak dapat tegak dalam agama³⁴ lebih lengkapnya ia berpendapat bahwa tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahay, tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani itulah pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Taimiyyah mengenai hubungan antara agama dan negara.

3. Sekuler

Kata sekuler dalam bahasa inggris berasal dari bahasa latin yang berarti juga *saeculum* yang berarti juga periode besar waktu, atau yang lebih dekat. Makna yang terkandung didalamnya adalah pemahaman baru yang terkini. Dalam kamus Webster sekulerisme berarti juga pengabaian atau penolakan atau pengasingan agama atas pertimbangan-pertimbangan keagamaan.³⁵ Bangsa Eropa dan Amerika merupakan penganut paham ini. Disisi lain meskipun banyak pertentangan mengenai konsep sekuler jika diterapkan dalam suatu negara, namun pentingnya pemahaman sekulerisme adalah bersatunya komunitas agama-agama yang ada di suatu negara ke

³⁴ Abdullah, *Hubungan Agama dan Negara Konteks KeIndonesiaan*, (Jurnal Politik Profetik, Vol 4 No. 2, tahun 2014), h.25. (On-Line). Tersedia di [Journal.uin-alauddin.ac.id>viewFile](http://Journal.uin-alauddin.ac.id/viewFile) diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 13.12), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³⁵ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler*, (Bandung: Mizan, 2007), h.71.

dalam satu tujuan politik jadi paham sekuler ini tidak sepenuhnya menyesatkan.³⁶

Hubungan agama dan negara dengan konsep ini menolak adanya hubungan antara dua hal tersebut dengan kata lain dua urusan tersebut terpisah. Konsep ini dimaksudkan untuk tidak smencampur adukkan Tuhan dalam perkara kenegaraan karena Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan untuk urusan lainnya diserahkan sepenuhnya kepada manusia.

Pandangan ini kerap dijadikan ideologi barat dan sempat menuai penolakan ketika disampaikan ke Indonesia, mengingat Islam di Indonesiadari masa ke masa terus mengalami gerakan pembaharuan Islam dimulai sejak tahun 1950. Tokoh sekuler yaitu

a. Muhammad Abduh

Tokoh yang berasal dari mesir ini dilahirkan pada tahun 1849 dari keluarga seorang petani. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Afghani ketika Ia belajar di Mesir hingga ia dikenalkan dengan kitab-kitab baru yang merupakan kitab karya penulis barat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab serta pengenalan kepada kondisi politik Mesir dan umat Islam secara umum, disinilah ia mulai memandang Islam dengan menggunakan kacamata baru.

³⁶ *Ibid*, h.62.

Setelah menjadi pengikut Afghani yang setia akhirnya Abduh tertarik untuk belajar ilmu jurnalistik. Dari Muhammad abduh inilah lahir tokoh-tokoh sekuler seperti Muhammad Rasyid Ridho dan Ali Abd Raziq.³⁷

Di tengah awamnya pandangan masyarakat yang melihat bahwa hubungan agama dan negara dipisahkan Abduh menolak satu persatu pemikiran yang sudah ada sebelumnya dengan memperbaiki, mengembangkan agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan zaman.

Pendapat Abduh mengenai kekuasaan keagamaan adalah *pertama*, Islam tidak memberikan kekuasaan bagi orang lain atau kelompok orang untuk menindak atas nama agama atau berdasarkan mandat dari Tuhan, *kedua*, tidak adanya hak untuk mencampuri urusan keagamaan orang lain termasuk juga para penguasa, *ketiga*, tidak diperbolehkan untuk memaksakan pengertian yang dianutnya dalam hal keagamaan kepada orang lain selain mengingatkannya kepada kebaikan dan menjauhkannya kepada keburukan.³⁸ Dari pemahaman yang diungkapkan oleh Abduh jelas pemikirannya lebih condong ke arah

³⁷ Munawair Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* h.120.

³⁸ *Ibid*, h.131.

pemisahan antara agama dan urusan pribadi tiap manusia terlebih soal negara.

Pandangan mengenai hubungan agama dan negara oleh Abduh nampak jelas pada saat ia menjabat sebagai perumus dan perencana Partai Nasional Mesir. Disana ia menjelaskan bahwa pendirian partai tersebut bukanlah sebagai partai agama melainkan partai politik sehingga anggota partai tersebut tidak hanya berasal dari golongan Islam saja bahkan siapapun bisa bergabung dalam partai tersebut ketika ia memiliki kewarganegaraan Mesir tanpa pandang bulu. Islam mengajarkan sikap persamaan dan membenci sikap membedakan antar sesama manusia.

b. Ali Abd Al-Raziq

Menurut Ali Abd al-Raziq kekuasaan tertinggi ada di tangan khalifah yang mengatur segala hal termasuk urusan masyarakat, baik kehidupan, keagamaan dan keduniaan sehingga manusia wajib untuk mentaati pemimpinnya. Ini merupakan argument pertama yang digunakan oleh Abd al-Raziq, namun dalam argument selanjutnya ia mengatakan bahwa mendirikan khilafah tidaklah menjadi kewajiban bagi umat Islam karena dalam Al Quran, Hadist dan juga Ijma' ia belum mendapatkan dasar yang kuat atas pendirian khilafah dan lembaga khilafah tersebut.

Untuk alasan mengenai keharusan-keharusan pengangkatan Khalifah sebagai pemimpin untuk menjaga keadilan, kelestarian umat dan kesejahteraan dibenarkan oleh Abd al-Raziq bahwa dalam kehidupan³⁹ bernegara diperlukan seorang pemimpin untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan umatnya, namun hal itu tidak harus diwujudkan dengan menggunakan sistem khilafah melainkan berbentuk lainnya sesuai dengan kepentingan negara.⁴⁰

Pendapatnya yang lain ia menolak kelompok yang menilai bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendirikan negara Islam di Madinah dan dijadikan sebagai negara ideal saat ini. Misi yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah SWT untuk seluruh umatnya, bukan menjadi pemimpin atau membawa misi politik lainnya. Melihat gambaran di atas sudah sepantasnya sebagai umat Nabi mengikuti jejak Nabi dengan mempersatukan umat di suatu negara bukan hanya dari golongan Islam saja namun seluruh agama.

Gambaran mengenai keharusan menggunakan syari'at Islam sebagai sumber hukum dalam suatu negara juga tidak dijelaskan secara detail dalam kitab suci. Maka dari itu,

³⁹ *Ibid*, h.137.

⁴⁰ *Ibid*, h.141.

nilai agama sudah sepantasnya ditanamkan dalam diri tiap individu sebagai landasan dalam berperilaku di kehidupan sosial politiknya tanpa harus menjadikan syari'at Islam secara mutlak dijadikan landasan suatu negara.

Menurut salah satu tokoh Indonesia yaitu Din Syamsuddin secara umum ada tiga paradigma yang menjelaskan mengenai hubungan agama dan negara yang dapat dipetakan sebagai berikut, *pertama*, Paradigma Integralistik. Paradigma ini menguatkan konsep antara agama dan negara merupakan sebuah kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan. Oleh karena ini negara dijadikan sebagai wilayah agama sekaligus juga lembaga politik dan keagamaan.⁴¹ Pemerintahan yang dijalankan haruslah berdasarkan atas kedaulatan Tuhan dan tidak bisa diganggu gugat. Kelompok ini memandang bahwa syari'ah merupakan hukum mutlak yang sudah mencakup segala hal di dalamnya, dan sudah selayaknya negara menjalankan fungsinya untuk menegakkan syariah di muka bumi ini. Konsep yang dianut dalam ketatanegaraan di paradigma ini masuk ke dalam teokratis yang juga dianut oleh para kaum fundamentalis Islam.⁴² Kaum fundamentalis menganggap bahwa Islam merupakan nilai mutlak yang harus secara totalitas diterapkan pada nilai-nilai yang dianggapnya mendasar dan prinsipal, sehingga semua aspek kehidupan diatur dalam Islam. Kelompok yang menganut paradigma ini adalah kelompok yang

⁴¹ M. Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 1999), h. 45.

⁴² Ahmad Suaedy, *Pergulatan Pesantren Demokrasi*, (Yogyakarta: Lkis, Cet. Ke-1, 2000), h. 90.

tergabung dalam aliran syi'ah dengan anggapan bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan menganut fungsi kenabian di dalamnya. Mengenai hukum yang digunakan adalah hukum yang berasal langsung dari tuhan, paradigma ini menggunakan landasan Al Quran surah al maidah 44

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Kentalnya pemikiran yang dianut kelompok ini dalam memandang kedaulatan Tuhan sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan secara komperhensif, hingga pada akhirnya ada istilah *al-Islam huwa al-din wa al-daulah*. Dengan begitu, negara Islam harus ditegakkan bahkan diperjuangkan demi terlaksanakannya syari'at Islam serta kepemimpinan yang sah di tangan khalifah atau imam. Penggunaan syariat Islam sebagai dasar Negara juga bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia karena dilihat dari BPUPKI dan sidang konstituante sudah ada perdebatan mengenai persoalan mengenai penerapan syariat Islam di Indonesia.⁴³ Perdebatan pemikiran mengenai ideologi negara sempat terjadi ketika perumusannya, antara kelompok nasionalis dan Islamis sama-sama menganggap bentuk negara dan ideologi yang dianutnya adalah yang paling tepat. kelompok Islamis menganggap bahwa perjuangan Indonesiatidak lepas dari perjuangan umat muslim,

⁴³ Abu Zahra, *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h.38.

namun di sisi lain tidak hanya umat muslim saja yang menjadi warga negara Indonesiamaka kurang tepat jika Islam dijadikan sebagai ideologi dan syariat Islam diterapkan di Indonesia.

Dari paradigma ini lahirlah konsep negara-agama dimana sumber hukum positif suatu negara harus diambil dari sumber hukum agama dan barang siapa yang menentang negara sama halnya dengan menentang agama Islam. *Kedua*, Paradigma Sekuleristik. Paradigma ini merupakan paradigma yang banyak dianut oleh negara barat, yakni antara agama dan negara tidak ada keterkaitannya satu sama lain. Menurut paradigma ini tidak ada hubungan integralistik atau hubungan simbiotik antara agama dan negara sehingga harus benar-benar dipisahkan.⁴⁴ Menurut kelompok ini aturan dalam Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja. *Ketiga*, Paradigma Simbiotik. Paradigma yang ketiga merupakan paradigma yang dianggap paling ideal, karena kelompok ini meyakini bahwa antara agama dan negara memiliki hubungan saling menguntungkan. Hubungan saling membutuhkan ini terlihat dalam hal negara membutuhkan agama karena dengan agama etika, moral, dan nilai-nilai kebajikan tiap individu akan berpengaruh besar dalam kehidupan bernegara, tanpa agama maka moral, akidah dan akhlak akan rusak. Sebaliknya pula agama memerlukan negara karena melalui negara itulah agama bisa berkembang dan bisa berdiri kokoh.

⁴⁴ Abdul Mun'im D.Z., *Islam di Tengah Arus Transisi*, (Jakarta:Kompas, 2000), h.9.

Kelompok yang tergabung dalam aliran ini adalah kelompok sunni, yaitu pangkat kepala negara berasal dari Tuhan, dimana kekuasaan yang dimiliki tidak hanya sebatas persoalan agama saja namun kehidupan politik yang terjadi di kehidupan masyarakat. Jadi, nilai-nilai demokrasi bisa diterapkan pada rakyat meskipun dengan batasan-batasan norma agama yang diyakini dalam diri masing-masing.

Dalam hal sumber hukum mereka menganut kepercayaan bahwa Al Quran bukanlah buku politik itulah yang diakui oleh kelompok yang menganut paradigma ini.⁴⁵ Alasannya adalah Aliran ini menyadari bahwa istilah negara atau dalam bahasa arab dikenal dengan daulah tidak ditemukan dalam kitab suci Al Quran meskipun ada beberapa ayat yang seolah menjuruskan ke arah politik, pemerintahan dan negara namun bersifat insidensial sesuai dengan keadaan yang ada sehingga ayat itu diturunkan. Penafsiran yang berlainan dari beberapa tokoh juga menjadi pertimbangan bahwa ayat-ayat tersebut bisa digunakan sebagai landasan dalam memahami hubungan agama dan negara.

Melihat ketiga paradigma tersebut semua memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Paradigma integralistik yang dinilai terlalu keras dan kolot dalam mempertahankan syariat Islam serta mewajibkan berdirinya negara Islam, nyatanya sudah terbukti bahwa negara yang menggunakan syariat Islam lebih maju dan disegani seperti Arab Saudi contohnya namun sayangnya perjuangan menegakkan negara Islam ini

⁴⁵ Din Syamsuddin, *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h.60.

dilakukan dengan cara yang salah sehingga Islam dipandang sebagai agama perang. Di sisi lain, paradigma simbiotik yang dinilai paling netral juga memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan yang dimiliki yakni menjadi jalan tengah di antara perdebatan mengenai hubungan agama dan negara, namun di sisi lain rahmatan lil alamin ini lebih condong ke arah sekuler sehingga dianggap umat Islam sebagai ideologi barat. Paradigma terakhir yakni sekuleristik juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di antaranya kelebihan dalam memisahkan agama dan negara mengingat tidak semua dalam satu negara tersebut beragama yang sama dan kelemahannya di bidang krisis moral dan akhlak jika agama benar-benar dipisahkan dalam kehidupan bernegara.

Jika dilihat dalam pandangan Islam sendiri negara mendapat kekuasaan dari tangan rakyat, seperti yang dicontohkan para khalifah dimana penunjukannya sebagai khalifah melalui musyawarah rakyat yang bersifat demokratik. Demokrasi sendiri berasal dari ide-ide asasi manusia, ide ini sering juga dikaitkan dengan hak asasi yang sifatnya alamiah yaitu dari alam, dari John Locke sifat alamiah ini sering dikaitkan pula dengan hukum alam sehingga tidak ada yang bisa menolaknya.⁴⁶ Wakil rakyat yang duduk di badan legislatif atas pilihan rakyat bertugas untuk membuat undang-undang yang memberikan kemaslahatan bagi rakyat itu sendiri.⁴⁷ Terlepas dari itu semua negara

⁴⁶ Norman P. Barry, *An Introduction To Modern Political Theory*, (New York: St Martin Press, 2007), h.182.

⁴⁷ Fazlurrahman, *Cita-Cita Islam*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 1988), h.132.

Islam memiliki tujuan yakni, mempertahankan keselamatan dan integritas negara, menjaga pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat, menjaga ketertiban dan membangun negara.⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa dari banyaknya aliran pemikiran dan paradigma yang dianut oleh tiap aliran dalam mengartikan negara serta hubungannya dengan agama, perdebatan selama puluhan bahkan ratusan tahun masih menjadi masalah aktual hingga saat ini. Secara umum aliran pemikiran dalam pemahaman teks tersebut dapat dikelompokkan menjadi *pertama*, Skriptualistik Dan Rasionalistik. Skriptualistik merupakan penafsiran Al Quran dan hadist dilakukan secara tekstual dan secara literatur sehingga bahasa menjadi standar dalam memahami ayat yang ada. Rasionalistik lebih ke arah kontekstual dimana penafsirannya disesuaikan dengan gejala dan lingkungan yang ada. *Kedua*, Idealistik Dan Realistik. Kecenderungan pemikiran ini terlihat dalam bentuk idealisasi terhadap sistem pemerintahan yang ada dengan menawarkan bagaimana sistem pemerintahan Islam yang paling ideal dengan menolak sistem kenegaraan yang sudah ada. Sedangkan realistik cenderung tidak memberikan penolakan karena dirasa sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan kebutuhan politik yang ada. *Ketiga*, Formalistik Dan Subtivistik. Pendekatan ini lebih melihat kepada bentuknya bukan kepada isinya dan sebaliknya substantivistik lebih melihat kepada isi daripada bentuknya.

⁴⁸ *Ibid*, h. 130-131.

B. Biografi Al Maududi dan Karyanya

1. Biografi Al Maududi dan Karyanya

Salah satu tokoh Islam kontemporer yang namanya sudah tidak asing di telinga adalah Abu Al-A'la Al Maududi, atau singkatnya sering disebut dengan nama Al Maududi. Lahir di daerah benua india, yaitu Aurangabad 25 september 1903.⁴⁹

Dari sejak ia kecil, Al Maududi dididik oleh ayahnya sendiri Sayyid Ahmad Hasan yang merupakan salah satu seorang tokoh sufi. Luangnya waktu yang dimiliki sang ayah setelah keluar dari profesinya sebagai pengacara membuat Al Maududi mendapat perhatian penuh dari sang ayah yang bisa mengajarnya banyak hal termasuk dalam kemurnian agama Islam. Ibunya bernama Ruqaiyah Begum, nasab ibunya berasal dari keluarga Turki yang bermigrasi ke India.

Salah satu penyebab ayahnya keluar dari profesinya sebagai pengacara adalah dari dalam hati nuraninya yang menolak beberapa hal dalam pekerjaan yang ditangani dan tidak sesuai dengan prinsip Islam yang dianutnya selama ini. Selain itu faktor eksternal yakni kehidupan rekan kerjanya yang sudah terpengaruh oleh globalisasi yakni gaya hidup kebarat-baratan sehingga makin jauh dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun sempat membuka kembali kantor pengacara namun sayangnya pelanggan sudah tidak banyak lagi yang mempercayakan

⁴⁹ Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Mizan: Bandung, 1985), h.7.

terhadap ayah Al Maududi. Hal ini dikarenakan perilakunya yang memurnikan Islam sehingga tidak mau sedikitpun melanggar aturan yang sekiranya menyeleweng. Karena sikapnya yang memutihkan yang putih dan menghitamkan yang hitam inilah pada akhirnya membuat pelanggan tak lagi mempercayakan ayah Al Maududi sebagai pengacaranya, di sisi lain pula setelah kehilangan pekerjaan sang ayah bisa lebih fokus dalam mengurus anaknya.

Pendidikan Maududi dalam segi bahasa dimulai dengan belajar bahasa Persia, urdu kemudian baru ia belajar bahasa arab. Tak hanya belajar dan mendalami bahasa, Maududi juga belajar tentang ilmu logika, hadist dan juga ilmu keIslaman tersebut diajarkan oleh sang ayah sejak kecil karena sang ayah memiliki keinginan agar maududi tumbuh menjadi tokoh besar pemikir Islam.⁵⁰

Sebelum maududi tumbuh menjadi penulis, ia semasa kecil sudah diarahkan oleh sang ayah untuk membaca terlebih dahulu. Karena bekal yang diberikan sang ayah untuk membaca banyak inilah akhirnya maududi mampu menulis beberapa buku saat ia dewasa. Bukan hanya pengaruh sang ayah saja, namun keinginan kuat yang dimiliki oleh maududi dalam bidang menulis juga berpengaruh besar terhadap kualitas tulisan-tulisan yang pernah ia torehkan.

Di tahun 1914 ia masuk ke madrasah fuqaniyah di Aurangabad, saat itu usianya masih 11 tahun. Di sekolah ini ilmu yang diajarkan condong

⁵⁰ *Ibid*, h.11.

dengan uthmaniyah univescity Hyderabad, dimana ilmu yang diajarkan disana berupa ilmu klasik dan ilmu modern disinilah maududi merasa cocok karena pada dasarnya ia tidak akan puas jika hanya melihat ilmu dari satu sisi saja. Salah satu wujud kecerdasan Al Maududi terlihat saat ia mampu menerjemahkan buku *al-mar'ah al-jadidah* ke dalam bahasa urdu, yang banyak diketahui bahwa buku tersebut merupakan buku yang ditulis oleh Qasim penulis ternama dari mesir yang dikenal pengikut aliran liberal. Sebenarnya tidak mengherankan jika ia mampu menerjemahkan kitab berbahasa arab ini ke dalam bahasa urdu mengingat dari kecil ia sudah menguasai tiga bahasa sekaligus.

Satu tahun setelah ia menempuh pendidikan di Aurangabad ia dan keluarga pindah ke Hyderabad pada tahun 1915. Pendidikan Maududi selanjutnya diteruskan di sekolah darul ulum, namun sayangnya ia tidak bisa menyelesaikan pendidikannya disini karena ayahnya jatuh sakit berkepanjangan dan keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk pengobatan disana. 6 bulan maududi menempuh pendidikan di darul ulum, ia dan keluarga pindah ke Bhopal. Inilah saat yang paling berat bagi maududi, dimana ketika usianya masih belasan tahun ia harus berhenti sekolah karena masalah finansial dan ia harus mencari uang dengan keringatnya sendiri demi mencukupi kebutuhan hidup.

Meskipun latar belakang ayahnya yang sangat Islami dan berharap anaknya bisa tumbuh besar menjadi seorang alim (kiai)⁵¹ namun

⁵¹ *Ibid*, h.12-13.

kenyataannya minat Maududi pada dunia politik lebih besar dibandingkan minatnya di bidang keagamaan. Tahun 1918 ia memulai karirnya di bidang jurnalis sesuai dengan bakat yang sudah ia miliki sejak kecil, dimulai dari bergabungnya Maududi dengan saudaranya yaitu Abdul Khair ia mulai dengan menjadi seorang editor dan jurnalis sekaligus. Ketika menulis esai kecondongan Maududi terlihat saat ia menuliskan esai mengenai kekaguman terhadap partai kongres, terlebih Mahatma Ghandi dan Madan Muhan Malaviya yang dulunya sangat menonjol.⁵²

Setahun setelah itu ia pindah lagi ke jubalpur, disana ia kembali aktif di media harian bernama Taj dimana majalah tersebut merupakan majalah yang pro-kongres dan aktif dalam penerbitan bahkan sampai menerbitkan dalam skala harian. Disini karena keaktifannya dalam bidang informasi akhirnya wawasan yang dimiliki mulai terbuka. Tugasnya dalam majalah untuk memprovokasi pembaca agar pro-kongres membangkitkan pemikiran kritisnya. Ia mulai banyak membaca kembali buku sejarah, fisiologi dan juga perbandingan agama. Hingga pada akhirnya, ia dan saudaranya pindah lagi ke delhi meneruskan lagi karirnya di bidang jurnalis dan juga ia lebih mendekatkan diri lebih intens bersama kaum muslim.

Tahun 1919 salah satu gerakan khilafah berdiri dengan tujuan melanjutkan kembali kelangsungan Khilafah Islamiyah pada dinasti ustmaniyah, Maududi bergabung pada gerakan tersebut dan disana ia

⁵² Khursyid Ahmad, *Islamic Perspective: Studies In Honor Of Mawlana Sayyid Abul A'la Mawdudi*, (New Heaven: London, 1979), h.17.

memiliki nama terpandang dikarenakan kemahirannya dalam berpidato dan juga menulis, hingga pada akhirnya ia diangkat sebagai ketua penerbitan organ panitia pusat gerakan tersebut yakni *al jami'ah* (1924-1928).⁵³

Peristiwa besar yang mempengaruhi pemikiran Al Maududi ketika bergabung dalam gerakan ini *pertama*, kematian tragis Swami Shradhanand, yang dibunuh oleh seorang muslim karena memegang keyakinan bahwa seorang muslim harus membunuh kafir. Melalui peristiwa ini terdapat perdebatan sengit antara keduanya yang menyulut emosi hingga Islam mendapat doktrin menjadi agama yang ditegakkan dengan jalan perang dan kekerasan. Melihat peristiwa itu seorang tokoh menangis saat membawakan pidatonya dan mengatakan tidak adakah yang mampu menjawab tuduhan bahwa Islam merupakan agama kekerasan, hingga pada akhirnya Al Maududi tergerak dan menulis artikel dengan judul perang dalam Islam, tidak hanya menjelaskan mengenai butir-butir peraturan dalam Islam namun Maududi secara detail juga menjelaskan bagaimana konsep Islam dalam bernegara dan juga sosialisasi bersama masyarakat. *Kedua*, peristiwa pelepasan india dari jajahan inggris khususnya hubungan mengenai umat beragama hindu dan umat Islam. Pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh partai kongres pimpinan Mahatma Ghandi dan Liga Muslim pimpinan Ali Jinnah sama-sama ditentang oleh Maududi karena menurutnya umat muslim tidak dapat lagi menjalankan

⁵³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, ... h.159.

pola hidup Islami seperti yang selama ini dijalankan dengan menerima tawaran-tawaran tersebut karena India di dominasi oleh masyarakat hindu. Penentangan sikap Maududi ini menunjukkan bahwa ia menolak nasionalisme yang diberikan oleh Liga Muslim karena dianggapnya “sekuler” dan juga menolak umat Islam dalam satu negara tunggal bersama dengan umat hindu, dan sebagai jalan keluar ia menawarkan *Revolusi Islam* sebagai jalan untuk terciptanya masyarakat dan negara Islam ideal seperti yang ada di masa *khulafaur rasyidin*.

Tahun 1937 Al Maududi pindah ke kota Lahore, dan disana ia bertemu dengan penyair besar yakni Muhammad Iqbal, kesempatan ini ia gunakan untuk bertukar pikiran mengenai kondisi umat muslim yang saat itu. Selain bertukar pikiran Muhammad Iqbal juga memberikan jalan sekaligus juga mendesak agar Al Maududi mau menerima tawaran chaudry T. ali yang ada di Punjab untuk mengurus tanah lahan pertaniannya, disana hasil pertanian itu akan cukup untuk kehidupan Al Maududi serta gerakan dakwahnya yang diberi nama *dar al-Islam*. Namun sayangnya tidak lama Al Maududi membangun perkampungan dengan konsep Islam tersebut ia berbeda pandangan dengan chaudry T. ali yang ternyata pengagum dari liga muslim dan pemimpinnya yakni Ali Jinnah. Chaudry T. ali memberikan saran agar Al Maududi tidak mencampur adukkan urusan politik di tanah wakaf miliknya terlebih dalam memandang Liga Muslim sebagai gerakan yang mengadopsi dari barat.⁵⁴ Karena batasan tersebut

⁵⁴ *Ibid*, h.160.

tidak diterima oleh Al Maududi akhirnya ia meninggalkan Punjab dan kembali ke Lahore bersama dengan pengikutnya dan kembali membangun gerakan yang bernama *Al-Ikhwān Al-Muslimin*.⁵⁵

Lahirnya Pakistan di tahun 1947 sebagai negara nasional Islam setelah pembagian India, ia dan pengikutnya selalu terlibat dengan perdebatan mengenai undang-undang Pakistan. Hingga di tahun 1948 di karawachi Al Maududi dan jamaatnya mengadakan pertemuan besar untuk membahas mengenai konsep negara. Hubungan Al Maududi dengan pemerintah Pakistan tidak baik hingga Al Maududi sempat di penjara selama 7 tahun dengan tuntutan provokasi terhadap rakyat untuk menentang pemerintah yang ada. Hubungan Al Maududi dengan pemerintah membaik setelah jenderal Zia Ul Haq berkuasa, dengan mengambil beberapa menteri dari anggota jamiat Islamiyah dan juga undang-undang Pakistan 1956 menampung sebagian besar konsep dari Maududi dalam sebuah negara Islam yang ideal.⁵⁶

Tidak selamanya Jamaati Islami berdiri, karena pada tahun 1958 partai yang dikomando oleh Al Maududi ini dianggap mengancam negara sehingga pada saat pemilu ketika jamaati Islami memiliki peluang besar untuk menang dalam pemilu, oleh jenderal Ayyub Khan dibubarkan dengan cara melakukan kudeta secara besar-besaran. Presiden saat itu yang menjabat yakni Iskandar Mirza melakukan pembubaran seluruh partai yang ada di Pakistan beserta seluruh parlemen yang ada, di tanggal 3

⁵⁵ Munawir Sjadali, *Islam dan Tatanegara*, ... h.167.

⁵⁶ *Ibid*, h.163.

september 1958 inilah jamaati Islami mati sementara.⁵⁷ Pada tahun 1962 Jamaati Islami hidup kembali pada masa Ayyub Khan menjabat sebagai presiden Pakistan beserta dengan partai politik lainnya yang sempat dikudeta secara besar-besaran tanpa ada pertumpahan darah.

Kiprahnya di dunia jurnalis yang penuh liku pada akhirnya membuat Al Maududi bisa berfikir kritis dan mampu menulis banyak buku. Karya Al Maududi yang menggambarkan pemikirannya terdapat 130 kurang lebih yang ditulis menggunakan bahasa inggris, arab dan juga urdu. Salah satu karya yang ditulisnya berkaitan langsung mengenai hubungan agama dan Negara adalah *The Islamic Law And Constitution*, selanjutnya ada buku yang berjudul *Islamic Way Of Life*, untuk buku yang dikumpulkan dari berbagai macam artikel yang pernah ditulisnya berjudul *Jihad Fi Al-Islam* dimana setelah buku ini diterbitkan ia mengatakan bahwa inilah yang membuatnya memahami sepenuhnya bagaimana cara kehidupan dalam Islam.⁵⁸

2. Corak Pemikiran Al Maududi dalam Memahami Hubungan Agama dan Negara

Idealisme Maududi dalam memandang Islam sangat kuat yakni menjadikan Islam sebagai jalan hidup “*as ways of life*” tanpa bisa tawar menawar lagi dan harus menjadi pijakan bagi manusia khususnya umat Islam. Al Maududi meyakini bahwa umat Islam masa kini yang

⁵⁷ Khaled B Sayyed, *The Jamaati Islami Movement in Pakistan*, (Pacific Affairs, Vol.30 tahun 1958) h.93. (On-Line). Tersedia di <https://www.jstor.org/stable> (diakses pada tanggal 5 Oktober, Pukul 20.30), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁵⁸ Abu Al A'la Al Maududi, *Jamaati Islami*, (Lahore:Markazi Maktabah Jama'ati Islami, 1953), h.23.

menganggap modern harus kembali kepada hukum umat Islam yaitu Al Quran dan as-sunnah secara mutlak.⁵⁹ Penolakan kerasnya diperlihatkan lebih kepada sistem demokrasi yang menekankan kepada kedaulatan di tangan rakyat. Sebagai gantinya ia berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang paling tepat dikembalikan kepada pemerintahan pada masa khulafaur rasyidin ketika ingin umat Islam kembali kepada masa kejayaannya.

Pengalaman pahit di dunia eropa menjadikan bangsa eropa menolak paham theokrasi yang dibawa, saat itu pendeta mengatasnamakan hukum bukannya dengan nama Tuhan sehingga hukum-hukum yang dibuat tidak bisa diterima baik oleh bangsa eropa, dari situlah paham theokrasi ditolak. Hukum buatan manusia yang dibuat oleh pendeta tentu berbeda dengan konsep Theokrasi yang dibawa oleh Maududi dalam memurnikan hukum Islam sebagai landasan suatu negara dan bertujuan untuk menyejahterakan seluruh golongan masyarakat.

Menurut Maududi dalam membangun negara merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim, sehingga negara itu harus dibangun namun tidak boleh sampai di dewa-dewakan. Struktur yang sudah dicontohkan pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan *khulafaur rasyidin* merupakan sistem yang paling ideal, seperti penerapan syari'at Islam yang sudah seharusnya dijadikan sebagai undang-undang seperti yang digambarkan di masa kejayaan Islam masa lalu. Secara rinci sistem

⁵⁹ Al Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1975), h.155.

pemerintahan khulafaur rasyidin yang patut dicontoh sebagai sistem pemerintahan paling ideal menurut Al Maududi akan dijabarkan di bawah ini.

Meskipun saat meninggal dunia Rasulullah SAW tidak menyebutkan siapa pemimpin pengganti setelah dirinya dan bagaimana sistem pemilihannya namun kaum muslimin sudah bersepakat untuk mendapatkan pengganti dari salah satu empat sahabat Rasulullah dan sistem pemerintah setelah peninggalan beliau ini dinamakan dengan *al-khilafah ar-rasyidah* yakni “khilafah yang adil dan benar”.⁶⁰ Sistem yang mencirikan pemerintahan model ini adalah cara pemilihan pemimpin yang dilakukan berdasarkan musyawarah atas kesepakatan masyarakat umat muslim seperti halnya ke empat khalifah selepas wafatnya Rasulullah SAW yang dinobatkan menjadi pemimpin karena kerelaan umat, selanjutnya amanat baitul maal dimana hal ini merupakan amanat yang diberikan Allah SWT dan kaum muslimin sehingga segala pengeluaran dan pemasukan tidak boleh keluar dari syari’at Islam. Mengenai kekuasaan Undang-undang para khalifah tidak pernah meletakkan dirinya di atas Undang-undang dan mengenai hakim sekalipun yang telah diangkat menjadi khalifah tetap merdeka dalam hal menghakimi khalifah apabila ia mendapatkan masalah yang bertentangan dengan Undang-undang. Dalam hal pemerintahan tidak dikenal fanatisme suku (ashabiyah) karena khulafaur rasyidin sekalipun tidak mengangkat anggota keluarga atau

⁶⁰ *Ibid*, h.156.

sanak keluarganya untuk menjabat sebagai pejabat pemerintahan kecuali pada Usman Bin Affan ketika ia mengambil kebijakan dengan mengangkat keluarganya sebagai pejabat dan memberikan kemudahan dalam hal harta sebagai bentuk silaturrahim antar keluarga berkobarlah pemberontakan terhadap Usman. Terakhir, ciri dari pemerintahan ideal menurut Al Maududi ini adalah pemerintahan demokrasi, kebebasan berpendapat di setiap masalah terbuka seluas-luasnya dan juga pemerintah tidak anti terhadap kritik yang diberikan oleh umatnya.⁶¹ Kendati segala prinsip di atas pada masa khulafaur rasyidin memang umat Islam berada di masa kejayaannya.

Secara mutlak untuk hukum yang ia gunakan dalam Al Quran dan As sunnah. Sunnah sendiri memiliki kedudukan kedua setelah Al Quran dalam hal sebagai landasan sumber hukum. Kenyataannya di masa sekarang ini, kesesuaian tindakan sahabat dengan tindakan Rasulullah disebut juga sebagai sunnah sehingga apapun yang dilakukan sahabat jika sesuai dengan Rasulullah maka bisa dikatakan juga sebagai sunnah.⁶²

Untuk ayat Al Quran ia menggunakan landasan sebagai berikut.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا أَصْلَحَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمْكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ

⁶¹ Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*...h.113-130.

⁶² Alamsyah, *Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Al-Adalah, Vol 12, No.3 tahun 2015), h.482. (On-Line), Tersedia di ejournal.radenintan.ac.id (diakses pada tanggal 19 September 2019, pukul 13.30). dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ



dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Juga hadist yang Artinya:

“Akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, maka seorang pemimpin (imam) yang memimpin manusia adalah pemimpin manusia dan ia akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, dan seorang hamba sahaya adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Muslim)

Pandangan maududi mengenai hubungan agama dan negara adalah saling berkaitan satu sama lain tanpa bisa dipisahkan, mengingat Islam merupakan agama yang lengkap dan kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Hukum yang mutlak digunakan adalah hukum Allah yang berasal dari Al Quran dan Sunnah dan harus ditetapkan sebagai undang-undang tertinggi, dan tidak satu orang mukmin sekalipun yang berhak untuk menciptakan hukum selain dari dua sumber tersebut.⁶³ Mengenai Tujuan suatu negara tidak boleh melenceng dari tiga hal yang pertama, yakni

⁶³ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* ... h.62.

menegakkan keadilan dalam hal ini diterapkan dengan pemberantasan kezaliman dan menindak tegas sikap sewenang-wenang golongan tertentu, *kedua*, sistem penegakan shalat dan kewajiban membayar zakat diperhatikan dan diberikan wadah yang memadai sehingga negara bisa mewujudkan kebaikan dan menebar kesejahteraan sebagaimana disebutkan tujuan manusia untuk diutus di muka bumi ini sebagai *rahmah*.⁶⁴ Jadi, pokok pemikiran maududi mengenai kenegaraan di golongankan menjadi tiga hal.

1. Islam adalah agama yang lengkap dan paripurna sehingga dalam persoalan kenegaraan Islam harus dijadikan landasan setiap individu dan negaranya dalam mengatur persoalan sosial politik. Dengan begitu, konsep negara yang dibawa oleh barat tidak perlu untuk ditiru.
2. Kedaulatan di tangan rakyat berupa demokrasi merupakan sesuatu yang salah. Kedaulatan tertinggi berada pada kekuasaan Tuhan yang dinilai mutlak, sehingga manusia yang ada di muka bumi ini hanya sebagai khalifah dan wakil Tuhan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.⁶⁵
3. Sistem politik Islam adalah sistem yang universal sehingga tidak mengenal batasan-batasan dan ikatan geografis, kebangsaan dan bahasa.

⁶⁴ *Ibid*, h.76.

⁶⁵ Muhammad Asnad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), h.125

Jika melihat ulang riwayat hidup Al Maududi, ia merupakan tokoh yang menolak Liga Muslim setelah Pakistan memisahkan diri dengan India. Gagasan nasionalisme Islam yang digagas oleh Liga Muslim dianggap tidak sesuai dengan tujuannya dalam mendirikan negara Islam, justru sebaliknya liga muslim merupakan partai yang condong ke arah sekuler. Dalam riwayat hidupnya tidak ditemukan sama sekali bahwa Al Maududi menolak didirikannya sebuah negara Islam, justru sebaliknya negara Islam harus ditegakkan bukan hanya sebatas ibadah saja seperti menegakkan shalat, puasa dan ibadah lainnya namun juga menegakkan negara Islam dengan menjadikan syari'at Islam sebagai undang-undang.⁶⁶ Kedudukan seorang amir juga tidaklah sama dengan konsep yang dibawa oleh dunia barat, dimana kedudukan *amir* berada di lembaga eksekutif dan inilah yang membedakan antara negara yang dengan konsep barat dengan negara yang menggunakan konsep Islam.⁶⁷ Wajar jika Maududi memandang *amir* berada di lembaga eksekutif karena disini selain menjadi seorang pemimpin negara ia juga menduduki posisi sebagai wakil tuhan sehingga pebuatannya menjadi contoh dari rakyat yang dipimpin.

Membahas mengenai *Ahl Al-Hall Wa Al-A'qd* sebagai badan legislatif, dimana ia bertugas untuk menjadi lembaga perwakilan rakyat yang memberikan perwakilan atas suara rakyat. Untuk prosedur pemilihan lembaga

⁶⁶ Arsyad Sobby Kesuma, *Menilai Ulang Gagasan Negara Khilafah Abu Al-A'la Al Maududi*, (Ulummuna, Vol.12, No.2, tahun 2008), h.286 (On-Line). Tersedia di scholar.google.id>citations (diakses pada tanggal 21 Oktober 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁶⁷ Abu Al-A'la Al-Madudi, *Sistem Poitik Islam*h.347.

ini sama halnya dengan pemilihan dewan di negara modern yakni melalui perwakilan partai yang diajukan saat pemilu kemudian dipilih langsung oleh rakyatnya. Ketika sudah terpilih menjadi anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-A'qd* maka secara otomatis ia harus mengikuti dan terikat dengan *amir* serta mendukung segala keputusan dan tindakannya.⁶⁸ Mengenai tugas yang diemban oleh *Ahl Al-Hall Wa Al-A'qd* ialah, *pertama*, sebagai lembaga yang memberikan jalan tengah atas permasalahan serta berhak memberikan fatwa atas suatu masalah, *kedua*, ketika ada suatu hukum yang sudah jelas tertulis dalam Al Quran maka sebagai lembaga legislatif berhak untuk menegakkannya dalam bentuk pasal serta menggunakan definisi paling jelas dan relevan dengan permasalahan yang ditangani secara rinci, *ketiga*, ketika hukum dalam Al Quran memiliki makna dan penafsiran lebih dari satu, maka lembaga ini berhak untuk menggunakan penafsiran mana yang paling sesuai, *keempat*, jika ada isyarat yang jelas terdapat dalam Al Quran dan *sunnah* maka sudah menjadi kewajiban untuk menegakkan hukum sesuai dengan yang tertera dalam dua kitab tersebut, *kelima*, jika masalah tidak ada dalam konvensi khulafaur rasyidin maka penafsiran yang harus dilakukan adalah bahwa Tuhan telah membiarkan manusia melakukan legislasi dalam memberikan keputusan dengan jalan yang terbaik.⁶⁹

Mengenai kriteria pemimpin yang dianggap ideal bagi Al Maududi yakni beragama Islam, sehingga bagi non muslim tidak ada hak untuk menjadi

⁶⁸ Al Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Islamic Publications: Lahore, 1960), h.230.

⁶⁹ *Ibid*, h.246.

seorang pemimpin negara. Syarat selanjutnya yakni seorang laki-laki. Syarat ini juga secara langsung berarti bahwa bagi seorang perempuan tidak memiliki hal sebagai pemimpin negara. Alasan ketiga yaitu, waras dan dewasa. Ini cukup masuk akal untuk dijadikan sebagai kriteria seorang pemimpin ideal karena tanpa akal sehat dan kedewasaan diri maka negara dalam kondisi bahaya. Terakhir, seorang pemimpin harus berasal dari negara Islam tidak boleh yang lainnya. Berdasarkan kriteria pemimpin yang dijelaskan di atas Al Maududi mengambilnya dari ayat-ayat Al Quran yang berkaitan.⁷⁰

Penolakan Al Maududi juga terletak pada sistem demokrasi dimana demokrasi adalah sistem kedaulatan di tangan rakyat. Ia menolak berdasarkan praktik demokrasi itu sendiri yang kerap menyeleweng bukan lagi rakyat yang menentukan suatu dasar hukum negara melainkan sekelompok kecil penguasa, hal ini lebih cocok jika digunakan kalimat hukum besi oligarki, yaitu kekuasaan oleh pemerintah menentukan segala hal dalam bidang sosial politik dan budaya tanpa mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Namun, penolakan Al Maududi terhadap konsep demokrasi bukan semata karena alasan di atas saja namun lebih condong kepada alasan bahwa dalam pemahaman mengenai ayat yang terdapat di dalam Al Quran adalah kekuasaan atau kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan yaitu Theodemokrasi.

Tahun 1953 Al Maududi yang sepanjang hidupnya selalu menawarkan perjuangan terhadap Islam dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan

⁷⁰ Abul A'la Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, ...h.96.

“subversive” yang ada kaitannya dengan sekte Ahmadiyah Qadiani. Yang menarik dari peristiwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada Al Maudui ini ia bukannya meminta untuk banding agar hukumannya dihapuskan namun ia malah gembira dengan hukuman mati ini. Melihat keteguhan yang dimiliki oleh Al Maududi pada akhirnya pemerintah mulai goyah dan mengganti hukuman mati tersebut dengan hukuman seumur hidup.⁷¹



⁷¹ *Ibid*, h.10.

BAB III

BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID DAN KARYANYA

A. Biografi Nurcholish Madjid dan Karyanya

1. Biografi Nurcholish Madjid

Di desa Mojoanyar di kecamatan Bareng Jombang selatan Nurcholish Madjid dilahirkan. Tepat pada tanggal 17 maret 1939 M dari seorang ayah bernama H. Abdul Madjid yang memiliki latar belakang pendidikan di tebuireng, jombang. Ibunya adalah saudara kandung Rais akbar NU. Sapaan akrab Nurcholish Madjid adalah Cak Nur, ia lahir dari empat bersaudara.

. Cak Nur menikah pada tahun 1969 di madiun yang pada saat itu. Latar pendidikannya dimulai dari ia sekolah di SD sekaligus juga dengan menempuh pendidikan di madrasah wathoniyah, hal ini dikarenakan kepala madrasah masih saudara dekatnya.⁷² Madrasah tersebut selain milik saudaranya juga di kepalai oleh ayah kandungnya sendiri, dan ketika belajar Cak Nur kerap membaca koleksi buku atau kitab-kitab yang ada dibandingkan dengan bermain bersama teman sebayanya.

Selesai menempuh pendidikan pertamanya ia melanjutkan ke pesantren Darul Ulum yang termasuk salah satu pondok terbesar di Jombang yang didirikan oleh tokoh NU. Namun hanya bertahan dua tahun di pondok pesantren itu Nurcholish Madjid merasa tidak kerasan karena ejekan yang dilemparkan teman dan sebagian gurunya tentang latar belakang ayahnya

⁷² Marwan Saridjo, *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005), h. 1-2.

yang seorang tokoh masyumi namun menyelokahkan anaknya ke pondok NU yang santri dan gurunya pakai sarung. Salah satu ejekan yang menohok adalah "ini anak masyumi kok kesasar". Selain menempuh pendidikan di pondok, Nurcholish Madjid juga masuk ke sekolah negeri, sehingga ia terbiasa dengan dua latar belakang pendidikan berbeda dan ditempuh dalam waktu bersamaan.

Pulang ke rumah dengan prestasi juara kelas yang selalu diraihinya ia bercerita kepada sang ayah mengenai alasan ia tidak betah dan meminta ayahnya untuk masuk ke dalam NU, karena baginya tidak sulit bagi sang ayah untuk masuk NU melihat latar belakang pendidikannya di Tebu Ireng dan dekat dengan tokoh besar NU yaitu Hasyim Asy'ari. Namun berbeda dengan anggapannya bahwa sang ayah mau untuk masuk NU ternyata kebalikannya, ayah Nurcholish marah besar dan mengambil keputusan untuk memindahkan sekolah Nurcholish Madjid ke Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo. Perpindahan Cak Nur ke Pesantren Gontor melengkapi proses migrasi Cak Nur karena secara kultural dan intelektual berada dalam asuhan dan pengaruh kaum modernis Islam.⁷³ Ketika di pondok ini ia merasa kerasan karena orientasi pendidikannya yang lebih mengarah kepada kemandirian dan juga kemampuan bahasa asing yakni bahasa arab dan inggris sebagai bahasa yang digunakan dalam proses belajar mengajarnya. Alasan lain yang membuat ia betah juga adalah tidak adanya selisih antara kaum NU dan Muhammadiyah dalam mempertahankan budayanya masing-

⁷³ Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998), h.22.

masing. Mengenai ibadahpun misalnya sholat tarawih kerap dilakukan 23 rakaat atau juga 11 rakaat, adzan juga dilakukan 1 kali atau 2 kali tergantung kesepakatan.⁷⁴

Pendidikan di Gontor inilah yang akhirnya mempengaruhi dalam pemikiran dan perkembangan intelektualnya, yang ia jadikan bekal untuk masa depannya termasuk ketika ia masuk ke Jakarta. Ia kuliah di IAIN syarif hidayatullah Jakarta dengan memasuki fakultas adab jurusan sejarah dan kebudayaan Islam. Pada awalnya Nurcholish Madjid dijanjikan untuk melanjutkan kuliah di Mesir oleh K.H Zarkasyi, karena kecerdasan yang dimilikinya semasa menempuh pendidikan di Gontor. Namun, dikarenakan saat itu terdapat permasalahan untuk mengurus visa ke mesir yang sedang mengalami krisis, keberangkatannya ditunda hingga satu tahun. Risau karena panggilan melanjutkan pendidikan ke Mesir tidak kunjung datang K.H Zarkasyi mengirimkan surat ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar Nurcholish Madjid bisa diterima disana.⁷⁵

Semasa kuliah ini ia habiskan untuk belajar bahasa asing selain dua bahasa arab dan inggris, yakni bahasa prancis dan bahasa lainnya. Ia juga mulai aktif di dalam dunia kepenulisan sehingga tulisannya mulai dimuat di media massa. Selain dari kegiatan tersebut Cak Nur disibukkan dengan kegiatannya dalam bidang organisasi, ia masuk ke dalam organisasi HMI sebagai wadahnya dalam mengembangkan wawasan keIslaman yang merupakan organisasi independan bukan seperti PMII *underbouw* NU, dan

⁷⁴ *Ibid*, h.6.

⁷⁵ *Ibid*, h.24.

di HMI inilah ia mendapat lawan debat dan diskusi bukan dari golongan NU melainkan dari golongan masyumi. Dengan penuh semangat dalam organisasi yang diikutinya, Nurcholish Madjid memulai dari komisariat, lalu menjadi ketua umum HMI cabang Jakarta kemudian menjabat sebagai PB HMI.

Ketika ikut dalam organisasi HMI Nurcholish Madjid aktif menulis buku untuk pedoman perkaderan materi keIslaman yaitu Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP). Buku tersebut sampai sekarang menjadi pedoman bagi kader anggota HMI.

Semangat yang tinggi Nurcholish Madjid semasa berkecimpung di dunia HMI membuat ia terpilih menjadi PEMIAT (Pemilihan Delegasi Asia Tenggara).⁷⁶ Di tahun 1967-1999 inilah tahun dimana Nurcholish bisa menarik Malaysia menjadi salah satu Islam regional dan menjadi salah satu pengalamannya dalam mengunjungi luar negeri. Tidak hanya sampai disini, pada tahun 1998 Nurcholish kembali diundang ke Amerika untuk menghadiri undangan State Departemen. Pada saat menghadiri undangan ini Nurcholish masih sangat menentang pemikiran barat dan bersikap anti terhadap barat, namun ternyata menurut salah satu pejabat kedutaan amerika Nurcholish sengaja diundang untuk memperlihatkan apa yang selama ini dibencinya tidaklah semuanya salah. Undangan tersebut merupakan acara bertema “Profesional Muda Dan Tokoh Masyarakat”.

⁷⁶ Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Jakarta:Republika, 2004), h.37.

Sikapnya yang saat itu masih anti dengan pemikiran barat membuat ia malas menghadiri undangan tersebut pada awalnya. Ia lebih tertarik untuk datang dan mengunjungi Negara timur tengah dibandingkan datang ke Amerika. Dengan perbekalan yang masih tersisa, se usai ia menghadiri acara tersebut selama kurang lebih lima minggu, ia terbang ke Timur tengah.⁷⁷

Tidak hanya satu kali ia mengunjungi timur tengah, karena untuk kali keduanya Nurcholish terbang lagi ke negara tersebut namun bersama rombongan PB HMI sekitar 10 orang. Disini, ia mendapat hadiah berupa perjalanan haji oleh Syaikh Hasan karena ketertarikannya terhadap gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa Islam di Indonesia. Rombongan PB HMI ini selain melakukan ibadah haji, Juga melanjutkan ke beberapa kota hingga ke kota Pakistan. Di salah satu kota yaitu Khartoum rombongan ini mendapat kesempatan untuk berdialog dengan Hassan Turabi dari umim university.⁷⁸

Dalam dunia penulisan pengalaman Nurcholish Madjid juga tak kalah banyaknya. Ia pernah menjadi pimpinan umum dua majalah sekaligus. Di tahun 1984-1987 ia memimpin pula LSIK (Lembaga Study Ilmu-ilmu Kemasyarakatan), sekaligus bekerja di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Di tahun 1986 ia bersama dengan rekannya membangun yayasan wakaf paramadina. Di yayasan ini selain ia mendirikan ia juga memimpin langsung, sehingga ia dan teman-temannya bisa bertukar fikiran dan

⁷⁷ *Ibid*, h.38.

⁷⁸ *Ibid*, h.39-40.

pendapat mengenai wawasan dan pengetahuan yang dimiliki. Inilah pula tujuan dari pendirian yayasan wakaf paramadina.

Di tahun 1978 ia mendapat gelar sarjana kemudian Ia melanjutkan studi ke Chicago, Amerika Serikat sampai meraih gelar doktor dalam bidang kalam dan filsafat. kuliahnya di Amerika tersebut karena *ford foundation* yang memberikannya beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya disana hingga mendapat gelar doktor.

Saat di Negara inilah Nurcholish Madjid mendapatkan banyak referensi bacaan mulai dari buku Islam klasik hingga abad pertengahan di bawah monitor Fazlur Rahman, yaitu seorang ilmuwan asal Pakistan yang merupakan ilmuwan neo-modernis. Sejak pertemuan dengan Fazlur Rahman inilah pemikiran neo-modernis mulai ia serap dan menjadi pemikiran baru dalam menempuh pendidikannya di S3.⁷⁹

Nurcholish Madjid meninggal pada Tahun 2005 bertepatan dengan tanggal 29 Agustus di usia 66 tahun. Ia merupakan salah satu tokoh pembaharuan Islam kontemporer dengan pemikiran terbaik, termasuk di dalamnya juga menyebutkan persiapan umat Islam memasuki zaman modern di tahun 1990.

B. Karya Nurcholish Madjid dan Corak Pemikirannya

Cak Nur merupakan tokoh yang produktif dalam menorehkan pemikirannya di dalam sebuah tulisan. Tulisan tersebut berupa essay dan

⁷⁹ Abuddin Nata, *Study Islam Komperhensif*, (Kencana: Jakarta, 2011) ,h.324.

artikel yang sebagian sudah dibukukan. Bebeberapa karya Cak Nur yang sudah dibukukan antara lain:

1. *Islam Doktrin Dan Peradaban*
2. *Cita-Cita Politik Islam*
3. *Islam Kemodernan Dan KeIndonesiaan*
4. *Universal Islam.*
5. *Tradisi Islam Peran Dan Fungsinya Dalam Pembangunan Indonesia,*
6. *Masyarakat Religius*
7. *IndonesiaKita*

Setiap menulis Cak Nur tidak lepas menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam bidang politik, termasuk juga dalam hal kenegaraan inilah yang menjadi khas Cak Nur di setiap membaca tulisan-tulisannya di atas. Pada dasarnya pemikiran dan tulisan Cak Nur tidak melalui perjalanan yang singkat, melainkan dilalui setelah masa pergolakan yang melelahkan dan selalu dipengaruhi oleh Fazlurrahman. Pemikiran Cak Nur di atas setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, *pertama*, pertikaian internal sesama umat muslim karena tidak adanya satu otoritas kepemimpinan, disinilah letak disentrigrasi keagamaan terlihat. *Kedua*, perkembangan Indonesiayang melalui tiga tahapan dimana di tahapan orde lama dan orde baru Islam⁸⁰ dipandang dengan sinis oleh masyarakat. Pengaruh politik ini besar pengaruhnya terhadap karya-karya Cak Nur

⁸⁰ Deddy Djamaludin, *Zaman Baru Islam Indonesia*, (Bandung:Wacana Mulia, 1998), h.113.

yang sudah dibukukan. *Ketiga*, selain dari faktor agama dan politi, faktor ekonomi juga masuk ke dalam hal ini. Meskipun Indonesia merupakan negara Islam terbesar namun kenyataannya umat Islam di Indonesia adalah yang paling miskin dan terbelakang.⁸¹

B. Corak Pemikiran Nurcholish Madjid Mengenai Hubungan Agama dan Negara

Hubungan antara agama Islam dengan Negara menurut Cak Nur tidak pernah dijelaskan secara detail dalam sejarah Islam. Pada dasarnya Cak Nur memiliki pendapat bahwa Islam yang sesungguhnya bukanlah Islam yang berdiri tegak di atas lembaga formal Negara ataupun pemerintahan, namun Islam menjadi nilai spiritual dalam diri manusia dalam menegakkan pribadi yang berjiwa hanif, tauhid, demokratis, serta inklusif serta menghargai masyarakat.

Pemikiran Cak Nur yang sudah dipengaruhi oleh barat sangat terlihat terlebih dalam pembahasan mengenai agama dan negara ini. Ia berpendapat bahwa saat ini pasar ide bersifat Internasional sehingga dalam berfikir jangan terlalu nasionalis dan menyebabkan nativistik yaitu cara berfikir bahwa sesuatu itu bersifat baik jika berasal dari negeri sendiri. Ia menentang hal ini karena menurutnya Islam adalah agama cosmopolitan sehingga harus belajar dari bangsa lain pula, inilah pula semangat yang diajarkan Nabi yakni belajar meskipun ke Negeri China karena manusia adalah makhluk universal yang tidak boleh untuk segan belajar

⁸¹ Sufyanto, Masyarakat Tamaddun: *Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Cak Nur*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001), h.25.

kemanapun.⁸² Sesama manusia juga tidak boleh saling membedakan satu dengan yang lainnya, karena hanya dalam pandangan Allah SWT lah manusia itu berbeda dari satu pribadi ke pribadi lainnya menurut tingkat ketaqwaannya.⁸³

Tuntutan untuk membangun negara Islam tidak ditemukan pula dalam tuntutan Islam dengan upah pahala jika mendirikan dan dosa jika tidak memperjuangkannya. Islam cukup dijadikan esensi atau substansinya dalam menjalankan suatu negara tanpa perlu penegasan lagi dengan menggunakannya ke dalam bentuk formal yang sangat simbolis.

Negara dan Islam memiliki hubungan yang proporsional, dimana negara memiliki dimensinya rasional dan kolektif dan agama memiliki dimensi lain dalam segi spiritual dan individual. Bukan berarti antara Islam dan negara dipisahkan namun tetap Islam ada kaitannya dengan negara, namun dalam pendekatannya harus tetap dibedakan. Disinilah Nurcholish menolak jika Islam dijadikan sebagai ideologi karena baginya jika hal itu terjadi maka sama halnya dengan merendahkan agama Islam itu sendiri. Sebagai asas hidup yang paling benar dalam konteks kenegaraan adalah takwa dan ridho Allah SWT. Maksud daripada asas tersebut adalah kesadaran umat manusia dalam setiap perbuatannya bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi dan melihat. Tidak hanya sampai disitu

⁸² Nurcholish Madjid, *Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi*, (Jakarta: Dian Rakyat Paramadina, 2009), h.176.

⁸³ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h.25.

Tuhan juga akan meminta pertanggung jawaban atas perilaku manusia serta dampaknya bagi seluruh alam.⁸⁴

Ketika timbul pertanyaan mengenai apakah Islam relevan bagi kehidupan modern?, maka terdapat golongan yang memandangnya dari segi positif dan juga negatif dalam menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu tokoh yang memandang hal ini dalam kacamata positif adalah Ernest Gellner yaitu pendapat bahwa di antara agama Islam, Yahudi dan Kristen maka agama yang paling dekat dengan kemodernan adalah Islam. Baginya Islam memberikan ajaran mengenai universalisme, skriptualisme, egalitarianisme spiritual sangat dekat dengan partisipasi masyarakat akan demokrasi.⁸⁵

Salah satu konsep negara yang diatur dalam Islam yakni keadilan. Konteks keadilan dalam Al Quran sangat memungkinkan untuk diwujudkan di era modern saat ini. Melihat konteks keadilan, maka sudah sewajarnya jika konteks ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk penerapannya. Namun pada kenyataannya sekalipun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (universal) zaman agraris dan modern membutuhkan makna keadilan yang berbeda. Dalam konteks modern manusia ditempatkan pada ruang lingkup kapitalisme barat dan sosiologi timur dan Islam sering menempatkan diri berdasarkan ideologinya untuk menempatkan posisi di tengah antara keduanya atau *wasath*.⁸⁶

⁸⁴ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.97.

⁸⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina: 1995), h.466.

⁸⁶ *Ibid*, h.519.

Pemikiran Cak Nur yang diutarakan langsung melalui penjelasannya dan menuai banyak kontra adalah ketika ia menjelaskan mengenai hubungan Islam dengan ideologi pancasila. Di Indonesia penjelasan mengenai hubungan tersebut sudah melalui sejarah panjang, juga dalam hal kemiripan sejarah dimana UUD 1945 dan pancasila memiliki fungsi yang sama dengan piagam madinah dalam mempersatukan negara dan membangun kemajuan politik bersama.

Retorika yang terjadi pada umat Islam dalam merumuskan dasar negara pada sidang konstituante harus diingat kembali yaitu saat umat Islam masih dipenuhi cita-cita negara Islam untuk diwujudkan di Indonesia. Saat itu partai politik Islam dan negara sendiri masih mencari jati dirinya sehingga wajar jika gagasan tersebut muncul dan dikaji bersama. Meskipun tidak ada penjelasan dalam Islam secara konkrit dalam menafsirkan pemisahan antara agama dan negara namun tidak bisa jika agama dijadikan alat politik untuk mencapai kekuasaan suatu negara. Jika memang negara Islam yang diimpikan saat itu dijadikan sebagai masa depan Indonesia seharusnya perlu dikaji kembali karena persatuan umat saat itu hanya ada di masa Abu Bakar dan Umar, selanjutnya Usman dan Ali tidaklah efektif, dan untuk selanjutnya pasca perang Siffin muncul Dinasti Umayyah dan Abbasiyah disana hakikatnya bukanlah khilafah melainkan kerajaan.⁸⁷

⁸⁷ Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam*, (Prenamedia Grup:Jakarta, 2016), h.254.

Maka dari itu, Nurcholish Madjid memberikan solusi berupa jalan tengah untuk permasalahan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia yakni, Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara agama dan Negara dan juga bukanlah negara teokrasi yang kekuasaannya dipegang oleh Tuhan (pendeta atau rohaniawan untuk agama lain), karena itu sebagai jalan tengah Nurcholish menjelaskan bahwa yang paling cocok untuk Indonesia adalah negara pancasila yakni Negara yang berdasarkan pancasila. Karena kedudukan pancasila memiliki sejarah panjang yang sudah dibahas oleh kaum muslim baik yang menganut aliran sekuler atau muslim nasionalis. Penerimaan pancasila sebagai landasan negara merupakan keputusan yang benar, meskipun Islam tidak ditampilkan dalam pancasila namun nilai Islam masih tetap ada dan diposisikan senetral mungkin.⁸⁸

Pemikiran mengenai negara dan agama yaitu Islam menurut Cak Nur tidak pernah lepas dari tiga hal yaitu keIslaman, keindonesiaan dan kemodernan, maka dalam melihat banyak masalah juga selalu dilihat dari latar belakang tersebut. Berikut ini adalah pemikiran yang masuk dalam wilayah domestik Indonesia. pertama-tama pada masa awal Islam diperkenalkan, Islam dipandang sebagai agama yang keras (galak) hal ini menyebabkan non muslim kurang percaya jika Islam bisa membuka diri dan memiliki asas keadilan. Dalam hal ini sifat keras Islam diperlihatkan dalam kemauan umat Islam mendirikan negara Islam.

⁸⁸Nurcholish Madjid, *Islam universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.202.

Nurcholish Madjid pernah membahas mengenai sosialisme religius yang bukan menjadi istilah asing bahkan di dunia barat. Ir. Soekarno juga menjadikan sosialisme religius sebagai bentuk masyarakat yang dicita-citakannya sebab bagi bangsa Indonesiapancasila bisa dijadikan sebagai corak dan landasan hukum dalam setiap gagasan politik atau sosial. Jika selama ini doktrin barat menolak sisi religius untuk dimasukkan dalam unsur politik kenegaraan, itu tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Sebagai salah satu contoh di Jerman terdapat partai (Sosial Demokrat Jerman) SDP yang menjadi partai sekuler kemudian merevisi partainya sehingga tidak kaku dan doktriner dengan memasukkan unsur agama di dalam sistem ideologinya. Apa yang terjadi? Berkat revisi yang dilakukannya ini maka partai SDP mampu menarik massa dan memenangkan beberapa pemilu.

Mengenai kontroversi masalah makna dari sekuler sendiri, tidak dimaksudkan jika penerapan sekularisme kepada kaum muslim menjadikan kaum muslim tersebut seorang sekularis sebab sekularisme adalah nama sebuah ideologi dengan banyak fungsinya dalam kehidupan beragama sehingga pembebasan pemikiran mengenai sekularisme itu sendiri diperlukan mengingat dari historis umat Islam itu sendiri tidak mampu menilai mana nilai yang disangkanya Islami dan sifatnya itu sendiri apakah temporal atau transcendental.⁸⁹ Menjadi seorang sekularis disini bermakna untuk menjadikan umat Islam menduniawikan segala hal yang sebenarnya bersifat duniawi dan melepaskan kaitannya dengan hal yang bersifat

⁸⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), h.125.

ukhrawi dan selalu menguji kembali kebenaran-kebenaran dan fakta yang ditemui baik yang bersifat historis, moral dan juga mental yang kesemuanya itu dijadikan sebagai acuan sifat umat muslim.⁹⁰

Jika timbul pertanyaan lain mengapa sosialisme dan mengapa religius maka penjelasannya akan dijabarkan satu persatu. Sosialisme mungkin bukan permasalahan besar dalam penerimaannya di Indonesiasebab dalam pancasila yang sudah diterima oleh masyarakat terdapat kalimat keadilan sosial. Terlebih dalam konteks global dunia konteks sosialis tidak perlu lagi dipertanyakan terlebih di dunia barat (Eropa Barat) yang sudah menunjukkan sikapnya yang sosialis bahkan lebih negara tersebut lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan negara yang menganut paham sosialisme dibandingkan dengan negara berkembang meskipun negri barat masih di cap sebagai negri kapitalis. ⁹¹.Untuk memperbaiki masyarakat sendiri ⁹²hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis sosial maka persoalan sosial sangat wajar jika selalu actual untuk dibahas.

Melihat pemahaman sosialisme yang nyaris tidak ada perdebatan masuk ke pembahasan religius yang lebih serius persoalannya Mungkin jawabannya hanya bersifat pragmatis yakni karena bangsa Indonesia memang bangsa yang religius, atau karena trauma yang terjadi karena pemberontakan PKI. Namun dibalik membenaran alasan di atas alasan prinsipal yang lebih mengarah adalah pancasila yang memiliki kelebihan sosial dan ketuhanan yang maha esa bersifat religius dan menjadi cita-cita

⁹⁰ *Ibid*, h.150-151.

⁹¹ *Ibid*, h.132-133.

⁹² Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam*,(Yogyakarta: LKiS, 2011), h.66.

Indonesia. Dorongan tersebut tidak hanya sekedar tujuan ataupun cita-cita hidup bahagia di dunia saja namun juga untuk bekal kehidupan kekal di akhirat. Banyak pembahasan yang mengatakan bahwa sila pertama dijadikan sebagai sila yang menyinari sila-sila lainnya.

Masalah ideologi negara setelah kemerdekaan meskipun sudah hampir satu abad namun apakah Indonesiasudah benar-benar merdeka dalam hal hukum pendidikan dan lainnya dan meninggalkan warisan kolonial seutuhnya? Inilah yang harus diselesaikan karena merebut dan memperoleh kemerdekaan tidaklah cukup tanpa pengisian kemerdekaan itu sendiri yang nyatanya lebih sulit. Disinilah kewajiban Indonesiauntuk mencari kepribadian nasioanal (*national identity*) sebagai langkah pertama dalam rangka mengisi kemerdekaan.⁹³

Di antara kepemilikan Indonesia yang paling menonjol dan dominan adalah Islam. KeIslaman sendiri dijadikan simbol kebangkitan bangsa dalam menentang penjajahan dimulai dari gerakan ekspedisi Pati Unus dari kerajaan Demak hingga lahirnya partai pertama Indonesiayakni Partai Syarikat Islam Indonesia(PSSI) dan menjadi sumber inspirasi bagi perlawanan bangsa Indonesiaselanjutnya.

Penonjolan keIslaman memang tidak dapat dipungkiri dalam segala hal termasuk juga dalam bernegara. Hal ini merupakan salah satu bentuk penonjolan milik nasional yang paling penting dan inilah juga yang disebut sebagai *ideology oriented*. Islam yang membawa ideologi-oriented dalam

⁹³ *Ibid*, h.240.

rangka perombakan struktur politik dan juga dalam rangka modernisasi yang masih ala Nasakom. ditinggalkan dengan mengganti menjadi program-oriented.⁹⁴

Salah satu konsep yang diutarakan Nurcholish Madjid adalah *Islam Yes Partai Islam No* dengan pertanyaan yang timbul sampai dimanakah masyarakat tertarik dengan partai Islam ataupun organisasi Islam?. Jawabannya terdapat dalam kesimpulan bahwa jika perjuangan partai politik tersebut untuk menegakkan ajaran Islam dengan ideologinya maka dipastikan hal itu tidak menarik lagi. Salah satu alasannya adalah saat ini partai Islam tidak memiliki reputasi baik bahkan malah sebaliknya⁹⁵ contohnya adalah reputasi di bidang korupsi sebagian umat Islam yang makin lama semakin meningkat.

Kesimpulan pendapatnya bisa dilihat dari pernyataan bahwa dalam Islam sendiri tidak pernah dibenarkan adanya istilah kekuasaan, ruhani dan *ruhbaninyah* dan segala tindakan yang mengarah kepada kekuasaan ruhani pada orang lain tidak mungkin terjadi, dan hal tersebut masuk ke dalam menyaingi sifat ketuhanan (msuyrik). Hubungan agama dan negara merupakan hubungan yang proporsional tanpa bisa dipisahkan di muka bumi namun berada dalam dimensi yang berbeda.

⁹⁴ *Ibid*, h.241.

⁹⁵ *Ibid*, h.243.

BAB IV

ANALISIS

A. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Nurcholish Madjid dan Al Maududi Tentang Konsep Hubungan Agama dan Negara

Melihat beberapa tokoh Islam klasik hingga kontemporer dari belahan dunia memiliki pemikiran berbeda-beda mengenai hubungan agama dan negara disini salah satu yang menonjol adalah Al Maududi yakni ulama kontemporer. Ia dalam memahami hubungan agama dan negara memiliki pendapat bahwa negara Islam adalah negara ideal yang harus diwujudkan karena diyakini bisa mengalahkan model-model negara barat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep negara ideal yang menurutnya yang bersifat *khulafaur rasyidin*. Sifat negara yang dimaksud mengikuti masa *khulafaur rasyidin* yakni perwujudannya dalam pemilihan kepala negara tidak diperbolehkan dari agama non muslim, mendengarkan pendapat masyarakat dalam mengambil hukum atau keputusan dalam artian demi kepentingan semua lapisan, tidak adanya kekebalan hukum oleh pemerintah serta penerapan syariat Islam yang harus dimasukkan secara utuh dalam suatu negara sebagai undang-undang tanpa adanya hak orang mukmin untuk membuat hukum tersebut.

Pendapat Al Maududi di atas dipengaruhi oleh latar belakang konflik yang terjadi di negaranya antara Liga Muslim yang dipimpin oleh Ali Jinnah dan Mahatma Ghandi. Meskipun pada awalnya Al Maududi ikut menjadi salah satu pengagum Liga Muslim. Penolakan Al Maududi

terhadap Liga Muslim bukan diartikan sebagai penolakan terhadap negara Islam, melainkan penolakan tersebut lebih kepada arah Liga Muslim yang tidak lagi memperjuangkan negara Islam di India secara utuh melainkan lebih ke arah sekuler.

Nurcholish Madjid yang merupakan tokoh pembaharuan Islam Indonesia juga menyuarakan pendapat mengenai hal ini. Pendapatnya dapat terlihat ketika pada masa orde baru ia dan Abdurrahman Wahid tidak mengarahkan perjuangan tidak lagi ke arah negara Islam melainkan ke arah negara dengan masyarakat Islam. Dapat diartikan disini bahwa pendapatnya berbeda dengan Al Maududi yang mewajibkan negara untuk menerapkan syariat Islam sepenuhnya sedangkan Nurcholish Madjid lebih menekankan nilai-nilai Islam untuk ada di dalam kehidupan bermasyarakat tanpa harus menjadikan negara Islam sebagai simbolnya.

Lebih lanjut Nurcholish Madjid mengatakan bahwa alasan mengapa ia menolak gagasan negara Islam tersebut adalah sudah sepantasnya Islam dijadikan pedoman hidup bagi pemeluknya dan jika menjadikan Islam sebuah ideologi suatu negara maka sama halnya dengan merendahkan Islam itu sendiri dengan menyetarakan Islam sejajar dengan ideologi lain buatan manusia lainnya. Perwujudan negara dengan masyarakat Islam di Indonesiaini dilakukan dengan cara melakukan pembuatan Bank Syariah, Kompilasi Hukum Islam dan masih banyak lainnya.

Persamaan kedua tokoh tersebut dalam pendapat mengenai persamaan manusia di muka hukum. Al Maududi menyebutkan bahwa dalam

menerapkan hukum Allah SWT tidak dipandang warna kulit, jabatan dan status sosial lainnya begitu juga dengan Nurcholish Madjid yang tidak pernah menentang mengenai persamaan di muka hukum ini.

Kesamaan pendapat mengenai hubungan agama dan negara kedua tokoh tersebut juga terdapat kesamaan mengenai tujuan negara dan mengandung arti di dalamnya bahwa Islam memiliki kaitan dengan negara. Hal ini ditunjukkan dalam pendapat Nurcholish Madjid yang mengatakan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan terkandung dalam Islam begitu pula Al Maududi yang menjadikan tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk tujuan keadilan seluruh umat. Disinilah salah satu pendapat Al Maududi sama dengan Nurcholish Madjid bahwa negara dan agama saling berkaitan tanpa dapat dipisahkan. Namun Al Maududi lebih lantang dalam menyuarakan pendapatnya mengenai negara Islam yang harus ditegakkan oleh umat Islam sebagaimana menegakkan sholat, zakat, puasa dan lainnya sedangkan Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa pendapatnya mengenai tidak adanya pemisahan antara agama dan negara yang dimaksud tidak harus ditunjukkan dengan pendirian sebuah negara Islam melainkan Islam dijadikan sebagai landasan hidup bagi pemiliknya dan menempatkan Islam dalam aspek keduniawian.

Namun, dapat dilihat pula bahwa terhadap perbedaan mengenai konteks keadilan yang dikatakan oleh Al Maududi pada kenyataannya kontradiksi terhadap apa yang sudah dikatakan sebelumnya mengenai negara ideal. Ketidakadilan tersebut terlihat ketika pembatasan hak non

muslim dan wanita yang tidak diperbolehkan sebagai seorang pemimpin negara meskipun perempuan tersebut beragama Islam. Disini, terlihat bahwa Al Maududi kurang konsisten terhadap konsep keadilan yang seharusnya tidak membedakan derajat manusia baik itu laki-laki ataupun perempuan.

Mengingat kembali bahwa Nurcholish Madjid dan kawan-kawannya ketika ditugaskan untuk ke Amerika menyempatkan untuk mengunjungi negara bagian tengah, tentu ada sedikit pengaruh dalam membangun pemikirannya di kemudian hari. Satu sisi lainnya yang membuat Nurcholish Madjid dilihat dari latar belakangnya memiliki persamaan pemikiran dengan Al Maududi karena pernah menimba ilmu dari ilmuwan Pakistan yakni Fazlur Rahman yang mana ilmuwan tersebut berasal dari negara Al Maududi dan merupakan tokoh neo modernis.

Perbedaan antara dua pendapat tersebut mengenai keterkaitan antara agama dengan negara sangat tipis namun secara bentuk negara yang dipraktikkanya akan berbeda karena jika digolongkan maka Nurcholish Madjid termasuk golongan Islam sekuler tapi tidak menganut sekularisasi secara utuh.

Latar belakang mereka yang pernah mengalami perpindahan aliran juga berbeda. Awalnya Nurcholish Madjid di awal pendidikannya yang tidak mengekanganya untuk masuk dalam satu golongan Islam, dalam artian memiliki latar pendidikan yang memberikan kebebasan dalam memilih aliran Islamnya sangat anti terhadap pemikiran barat yang serba

baru, hingga saat menghadiri undangan ke Amerika sekalipun ia tetap tidak tertarik dan memilih untuk menyempatkan ke Timur Tengah sepulang dari Amerika pada akhirnya setelah ia berkesempatan untuk kuliah dan menimba ilmu disana pemikiran-pemikiran baru mulai tumbuh dan sedikit banyak merubah pola pikirnya mengenai pemikiran barat.

Berbeda dengan Al Maududi yang pada awalnya merupakan tokoh pengagum Ali Jinnah dan Liga Muslim yang di prakarsainya namun pada akhirnya ia memberontak karena merasa bahwa apa yang dicitakan oleh Liga Muslim tidak sama dengan negara Islam yang ideal menurutnya.

B. Relevansi Pemikiran Al Maududi dan Nurcholish Madjid Dengan Kehidupan Bernegara di Indonesia

Dalam beberapa rujukan terlihat bahwa konsep agama dan negara memiliki 3 paradigma sebagai acuannya yakni paradigma integralistik, simbiotik dan sekuleristik. Untuk paradigma yang paling cocok dengan Indonesiayakni paradigma simbiotik, dimana penjelasan dari paradigma ini adalah adanya hubungan saling keterkaitan satu sama lain antara agama dan negara meskipun Islam sendiri tidak dijadikan sebagai agama negara. Keterkaitannya ada dalam hal hukum Islam yang dijadikan rujukan beberapa sumber hukum Indonesia karena mayoritas agama di Indonesia adalah muslim dan mau tidak mau umat muslim harus menegakkan hukum agamanya secara mutlak, sehingga apabila hukum Islam benar-benar tidak

dimasukkan dalam hukum Indonesia maka pemberontakan akan memungkinkan terjadi.

Dalam hal ini negara juga mendapat keuntungan jika Islam dijadikan hukum meskipun dalam memasukkan hukum tersebut dilakukan dengan cara senetral mungkin sehingga bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, yakni dengan adanya unsur Islam yang dominan menjadikan *identity-oriented*. Ciri dari negara ini diperlukan sebagai identitas yang diperkenalkan kepada dunia terhadap apa yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya adalah mayoritas Islam terbesarnya.

Pada suatu negara, konstitusi dijadikan hukum tertinggi yang memuat segala hal mengenai penyelenggaraan negara, sehingga jika konstitusi tersebut diubah maka secara langsung tatanan hukum lainnya akan ikut diubah disini dapat disimpulkan jika konstitusi harus bersifat lebih konsisten daripada hukum lainnya seperti halnya di Indonesia yang menjadikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologinya.

Al Maududi dalam menentukan konstitusi sebagai hukum tertinggi diletakkan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga jika dilihat secara konteks keIndonesiaan untuk merubah sebuah konstitusi Pancasila menjadi konstitusi ketuhanan akan berubah segala halnya termasuk juga bentuk negara itu sendiri yang awalnya berbentuk Republik berubah menjadi negara Theokrasi (kerajaan Tuhan) dan untuk penerapan negara Al Maududi menentang keras demokrasi yang berasal dari barat dan untuk solusinya ia menawarkan kedaulatan di tangan Tuhan dengan konsep

Theodemokrasi yang ia tawarkan. Tentu hal ini banyak yang harus dipertimbangkan mengingat keragaman suku, agama, dan budaya kental Indonesiayang tidak bisa sepenuhnya dimasuki dengan nilai-nilai keIslaman namun juga tidak bisa jika harus menjadikan Islam secara mutlak sebagai agama negara..

Jika berbicara mengenai perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dan negara antara dua tokoh tersebut sangat nampak. Jika Al Maududi meskipun tidak pernah memaksakan dengan kekerasan mengenai pendirian negara Islam namun ia sangat keras pendapatnya mengenai Islam harus dijadikan ideologi suatu negara dengan sistem negara khilafah agar umat Islam kembali kepada masa kejayaannya. Tujuan negara yang ada dalam konsep Al Maududi yang ia yakini sesuai dengan konsep Al Quran tidaklah dapat dipandang buruk karena keadilan dan kesejahteraan sosial sekalipun yang tertera dalam dasar negara Indonesiabelum terwujud hingga kini dengan menggunakan konsitusi negara sekarang.

Meskipun di Indonesiaunsur keIslaman lebih ditonjolkan dalam segala bidang termasuk juga dalam bidang hukum, namun hal ini belum cukup jika dilihat dari konsep yang dibawa oleh Al Maududi dimana demi mendapatkan tujuan negara haruslah menggunakan konsep Islam secara keseluruhan yakni dengan menegakkan negara Islam. Mengingat bahwa mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Indonesiaadalah Islam maka perwujudan negara Islam seharusnya akan mudah dilakukan jika tidak melihat pertimbangan adanya agama lain yang ada di indonesia.

Nurcholish Madjid seorang tokoh pembaharuan Islam asal Indonesiasempat memberikan pendapat mengenai hal ini. Islam Indonesiamerupakan Islam terbesar di dunia pada tahun 2006, dalam rangka mencari identitas negara unsur Islam sengaja lebih ditonjolkan sebagai salah satu ciri dari apa yang dimiliki oleh indonesia. Dalam hal bentuk hubungannya mengenai hubungan apakah antara agama dan negara saling berkaitan atau tidak Nurcholish Madjid mengatakan bahwa Indonesiabukan negara sekuler bukan juga konservatif karena sebagai jalan tengah Indonesia memiliki pancasila sebagai dasar negara.

Namun disini pancasila yang dianggap sebagai ideologi paling sesuai dengan Indonesia pada kenyataannya merupakan ideologi yang telah masuk proses Islamisasi. Sebagai contoh selain sila pertama yakni sila ketiga “nasionalisme” diganti dengan kata “persatuan indonesia” karena kata tersebut dianggap tidak konsisten dengan prinsip universalisme Islam dan juga sila ke empat kata “hikmat” yang dituliskan untuk sikap hikmatnya kepada Nabi. Ini adalah pembuktian bahwa identitas asli orang Indonesia adalah muslim dan dan bangunan sejarah orang Indonesia juga Islami, dengan pandangan ini pula kerap diterangkan bahwa syariat Islam hanya akan diterapkan kepada masyarakat Islam saja meskipun dalam hal ini kerap terlihat adanya diskriminasi antara muslim dan non muslim serta strategi semacam ini kurang berhasil di negara seperti Nigeria dan Sudan.

Pada kenyataannya negara yang ideal yang di contohkan oleh Al Maududi yakni Madinah pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin

merupakan salah satu contoh bangunan komunitas Nasional modern yang lebih baik dari yang dibayangkan kemerdekaan yang dimaksud karena adanya sikap keterbukaan terhadap seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berpendapat serta pemimpin yang beresedia untuk selalu menerima kritik yang diberikan kepadanya.

Meskipun pendapat Al Maududi tersebut tampak kuat dalam konsep pendirian negara idealnya dan dirasa cocok namun tidak konsistennya Al Maududi dalam memberikan pandangan mengenai keadilan dan faktanya terhadap pembatasan hak kepada perempuan untuk menjadi kepala negara perlu dipertimbangkan kembali karena mengingat kembali konsep khulafaur rasyidin yang mana yang paling cocok untuk diterapkan mengingat dari empat khalifah memiliki sistem tatanan hukum yang berbeda saat menjabat sebagai Kepala Negara.

Jika memang negara Islam akan menjanjikan negara yang bisa datang kepada masa kejayaannya kenapa tidak melihat kepada contoh jatuhnya Baghdad di tahun 1245 yang tidak menyisakan apapun dan membuat kota tersebut hampir rata dengan tanah, apakah dari sini tidak seharusnya timbul pertanyaan bahkan negara Islam sekalipun juga bisa mengalami keruntuhan dan kerusakan sedemikian rupa. Sebagai salah satu contoh alasan untuk hal ini adalah sikap kemewahan yang terjadi pada umat muslim sewaktu itu sehingga barangkali menjadi skandal bagi umat negaranya sendiri. Kesimpulannya adalah bukan Islam sebagai jaminan

dengan pendirian negara Islamnya namun lebih kepada pelaksanaan nilai-nilai keIslaman itu sendiri termasuk sunnatullah di dalamnya.

Secara singkat dijelaskan bahwa pendapat Al Maududi mengenai hubungan agama dan negara meskipun terlihat keras dalam menegakkan negara Islam secara mutlak namun terdapat relevansinya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam di Indonesia sangat kental sehingga semua larangan yang terdapat dalam Islam juga dituliskan sebagai hukum di Indonesia hal ini menunjukkan bahwa konsep negara Islam yang ditawarkan oleh Al Maududi sesungguhnya nilai-nilai yang terdapat di dalamnya cocok diterapkan di Indonesia meskipun tidak sepenuhnya bisa diterapkan mengingat Indonesia memiliki keragaman agama. Disinilah pula letak pemikiran Nurcholish Madjid mengenai konsep hubungan agama dan negara yang cocok di Indonesia yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Islam cocok dijadikan landasan hukum Indonesia meskipun unsur Islam dimasukkan senetral mungkin tanpa harus menegakkan negara Islam secara mutlak.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Al Maududi mengenai hubungan agama dan negara adalah adanya keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan sehingga keharusan pembentukan negara Islam harus diwujudkan dengan mengacu pada sistem *khulafaur rasyidin* dan menggunakan pedoman Al Quran dan Sunnah sebagai hukumnya. lebih lanjut Al Maududi juga menolak adanya kedaulatan rakyat yang selama ini di adopsi dari barat karena pada hakikatnya ia berpendapat bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan (Theodemokrasi) bukan di tangan rakyat. Dengan menggunakan konsep negara Ideal tersebut maka umat Islam diyakini bisa kembali kapada masa kejayaannya. Nurcholish Madjid yang merupakan tokoh pembaharuan pemikiran Islam juga menyuarakan pendapatnya mengenai hal ini dengan pendapat bahwa negara Islam tidak akan menjanjikan kejayaan jika tanpa adanya kesadaran nilai-nilai Islam yang dijalankan oleh pemeluknya, bukan hanya pembuatan sebuah negara secara simbolis. Meskipun pendapat Nurcholish Madjid mengenai hal ini kerap dianggap sekuler namun ia sejatinya tidak menolak bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan saling keterkaitan, namun

untuk hal ini sudah seharusnya umat Islam menduniawikan hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak mengukhrawikannya seperti halnya negara, dan jika Islam dijadikan sebuah Ideologi maka sama halnya dengan merendahkan Islam dan menjadikannya setara dengan ideologi lain hasil pemikiran manusia.

2. Untuk relevansinya di Indonesia pendapat Al Maududi memiliki kecocokan dimana hukum Indonesia banyak menggunakan sumber hukum Islam sebagai pedomannya. Inilah pula yang disebut Nurcholish Madjid sebagai *ideology oriented* yaitu pemunculan Islam dalam hukum Indonesia sebagai identitas negara. Namun demikian pendapat Al Maududi tidak sepenuhnya cocok diterapkan di Indonesia karena Al Maududi mengharuskan pendirian negara Islam mutlak dan hal ini tidak sesuai jika melihat keragaman masyarakat Indonesia dari segi suku, budaya hingga agama.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah harus memperhatikan kembali gagasan negara Islam yang dikemukakan tokoh pembaharuan Islam dunia dan ditinjau kembali dengan pemikiran tokoh pembaharuan Islam di Indonesia untuk kesesuaiannya dengan tidak menolak mentah gagasan negara

Islam karena mau tidak mau unsur Islam harus masuk dan menonjol mengingat mayoritas agama di Indonesia adalah Islam.

2. Kepada Partai Politik

Partai politik yang menggunakan simbol Islam agar menjalankan nilai Islam di dalamnya dengan pedoman Al Quran dan Sunnah yang dimasukkan senetral mungkin agar bisa diterima baik oleh kaum non muslim serta memperbaiki citra partai Islam itu sendiri yang mulai memburuk dan kehilangan kepercayaan masyarakat muslim karena masih adanya tindakan korupsi dan permasalahan rasisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dalam Islam.

3. Kepada Masyarakat

Sikap tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah khususnya dalam permasalahan ideologi negara dan yang berkaitan dengan isu sara seharusnya dikaji kembali tuduhan tersebut dengan membuka mata selebar-lebarnya dan tidak berfikiran sempit dengan memahami kembali ajaran Islam dalam kitab suci secara tekstual maupun kontekstual sehingga tidak saling menyalahkan antar golongan bahkan bersikap antagonis terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abyhara, Bakar Abu, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010

Ahmadi, Munawar Muhammad, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*.
Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.

Al-Bana, Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Iskandaria: Daarud-Dakwah,
2018

Al-Maududi, A'la Abu, *Khilafah Dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1985.

Al-Maududi, A'la Abu, *Jamaati Islami*, Lahore:Markazi Maktabah Jama'ati Islami, 1953.

Ali, Muhammad, *Moderate Islam Movement In Contemporary
Indonesia*, Jakarta:Center For Strategic And International Studies, 2007.

Alfaris, Abdul Kadir Muhammad, *Fiqh Politik Hasan Al Banna*, Solo: Media
Insane, 2003.

An Na'im, Ahmed Abdullahi, *Islam Dan Negara Sekular*, Bandung: Mizan Media
Utama, 2007.

Arifin Zainal, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai
Pustaka, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,
Jakarta: Renika Cipta, 1993.

Arnold, W Thomas, *Sejarah Da'wah Islam* Trans Oleh A. Nawawi
Rambe, Jakarta:Widjaya. 1985.

Asnad, Muhammad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*, Bandung:

Pustaka, 1985.

Azra, Azyumardi, *Transformas Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*, Prenadamedia Grup:Jakarta, 2016.

Barry, P. Norman, *An Introduction To Modern Political Theory*,
New York: St Martin Press, 2007.

Burhani,Najib Ahmad, *Pluralism, Liberalism And Islamism: Religion Outlook Of TheMuhammadiyah Islamic Movement In Indonesia*, Tesis Faculty Of Humanities University Of Manchester, 2007.

D.Z, Mun'im Abdul, *Islam Di Tengah Arus Transisi*, Jakarta:Kompas, 2000.

Djazuli, Ahmad, *fiqh siyasah*. Jakarta:kencana, 2003.

Engineer, Ali Asegar, *Revolusi Negara Islam*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000.

Fazlurrahman, *Cita-Cita Isla*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1998.

Karim, Rusli M, *Negara Dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. Ke-1, 1999.

Khon, Majid Abdul, *Takhrij dan Metode Memahami Hadist*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2014.

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*
Jakarta: LP3ES, 2006.

Madjid, Nurcholish, *Indonesia Kita*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, Bandung:Mizan, 2013.

- Madjid, Nurcholish, *Islam universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Madjid, Nurcholish, *Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi*. Jakarta: Dian Rakyat Paramadina, 2009.
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Madjid, Nurcholis, *Cita-Cita Politik Islam*, Yogyakarta: Dian Rakyat, 2009.
- Mahmudah, Siti, *Historisitas Syari'ah: Kritik Reasi-Kuasa Khalil' Abd Al-Karim Di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016.
- Maududi, Abu A'la Sayyid, *The Islamic Law And Constitution*, Lahore Pakistan: Islamic Publication, 1959.
- Maududi, Al, *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1975.
- Moeleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Munawar, Husain Said Agil, *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Qutb, Sayyid, *Ma'alim Fi Ath-Thariq*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2009.
- Ridwan, Khalid Nur, et al, *Pluralisme Borjuis; Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Romli, Lili, *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rosyada, Dede et al, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2000.

Saridjo, Marwan, *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005.

Shimogaki, Kazuo, *Kiri Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2011.

Sivan, Emmanuel, *Radical Islam: Medieval Theology And Modern Politics*, Inggris: New Heaven , 1985.

Sjadali, Munawir, *Islam dan Tatanegara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Sofyan, A. Ahmad, dkk, *Gagasan Cak Nur Tentang Negara Dan Islam* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003.

Suaedy, Ahmad, *Pergulatan Pesantren Demokrasi*, Yogyakarta: Lkis, Cet. Ke-1, 2000.

Sufyanto, Masyarakat Tamaddun: *Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Cak Nur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2016.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983.

Syamsuddin, Din Muhammad, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1. 1999.

Syamsuddin, Din, *Etika Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.

Urbaningrum, Anas, *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*,

Jakarta:Republika, 2004.

Zahra, Abu, *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius Indonesia*, Bandung:
Pustaka, 2000.

Kamus

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Jakarta: kantor balai pustaka, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008.

Artikel Dan Jurnal

Abdullah, Hubungan Agama Dan Negara Konteks KeIndonesiaan tahun 2014, *Jurnal
Politik Profetik*, Vol 4 No. 2

Alamsyah, Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam tahun 2015,
Al- 'Adalah, Vol 12, No.3

Arsyad, Sobby, Kesuma, Menilai Ulang Gagasan Negara Khilafah Abu Al-A'la Al
Maududi tahun 2008 , *Ulummuna*, Vol.12, No.2

Khaled B Sayyed, The Jamaati Islami Movement In Pakistan tahun 1958, *Pacific Affairs*,
Vol.30

Suharto, Toto, Indonesianisasi Islam tahun 2011, *At Tahrir*, Vol. 32, No.2

Tahir, Masnun, Menjadi Muslim Di Negara Multicultural: Dinamika, Tantangan Dan
Strategi Dalam Perspektif Fikih Multicultural tahun 2017, *Al- 'Adalah*, Vol 14,
No.2 (2017)

Zaprul Khan, Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam tahun 2014, *walisongo*,
Vol. 22, No. 1

